

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK
PENYELENGARAAN DYNAMIC GOVERNANCE
DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI
KAWASAN WISATA KABUPATEN PANGANDARAN



OLEH

DR. ISMIYARTO, M.Si

DR. UDAYA MADJID, M.Pd

DR. HYRONIMUS ROWA, M.Si

AYU WIDOWATI JOHANNES, S.STP, M.Si

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

2021

LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN KELOMPOK IPDN

1. Judul Penelitian : **PENYELENGGARAAN DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID DI KAWASAN WISATA KABUPATEN PANGANDARAN**
2. Bidang Keilmuan : Administrasi Publik
Peneliti :
 - a. Ketua
Nama : Dr. Ismiyanto, M.Si
No.Reg Sertifikasi : 19134200108765
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I /IVb
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Scopus ID : 56955654800
 - b. Anggota
Nama : Dr. Udaya Madjid, MPd
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - c. Anggota
Nama : Dr. Hyronimus Rowa, M.Si
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - d. Anggota
Nama : Ayu Widowati Johannes, S.STP, M.Si
Jabatan Fungsional : Lektor
3. Pembantu Peneliti : (Mahasiswa/Praja)
 - a. Nama Anggota I : Reycardo Leonard Rondonuwu
 - b. Nama Anggota II : Citra Trimallahsari Ompi
 - c. Nama Anggota III : Revandy E.I. Wuntu
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pangandaran
5. Jumlah Anggaran : -
6. Rencana Publikasi : Dipublikasikan

Jatinangor, 10 Oktober 2021

Reviewer

Ketua Dosen Peneliti



Prof. Dr. Tjahya Supriyatna, SU

Dr. Ismiyanto, M.SI

Mengesahkan

Kepala Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan

Dr. Margaretha Rumbekwan, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN KELOMPOK IPDN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	11
1.2. Permasalahan	12
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN	14
2.1. Tinjauan Penelitian dan Kajian Terkait Sebelumnya	14
2.2. Tinjauan Teoritik Terkait	18
2.2.1. Pemerintahan	18
2.2.2. Pandemi Covid-19	38
2.2.3. Kebijakan Pariwisata	43
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1. Desain Penelitian	49
3.2. Sumber Data Penelitian	50
3.3. Teknik Pengumpulan Data	51
3.4 Informan dan Subyek Penelitian	52
3.5 Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan	53
3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian	55
3.6.1. Tempat/Lokasi Penelitian	55
3.6.2. Jadwal Penelitian	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran	56
4.1.2. Sejarah Kabupaten Pangandaran	60
4.1.3. Organisasi Perangkat Daerah Kab. Pangandaran	64
4.1.4. Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran	67
4.2. Hasil Penelitian	68
4.2.1. Penyelenggaraan <i>Dynamic Governance</i> Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran	69
4.2.2. Dukungan <i>Stakeholder</i> Dalam Penanganan Pandemi Covid-19	90
4.3. Pembahasan	98
BAB V PENUTUP	103
5.1. Kesimpulan	103
5.2. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Peranan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata dalam garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum keluar negeri. (Selo Soemardjan, 1991:133). Pengembangan wisata dari sektor bahari dianggap sebagai salah satu langkah yang tepat dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Berkembangnya pariwisata bahari diharapkan dapat menambah devisa utama negara dari sektor pariwisata yang saat ini masih mengandalkan potensi alam dan budaya yang berada di daratan. Selain untuk aktivitas pertambangan dan pelabuhan, laut dan pantai juga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi karena keindahan lautnya (Suwanto, 2004:17).

Pengelolaan pariwisata harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah

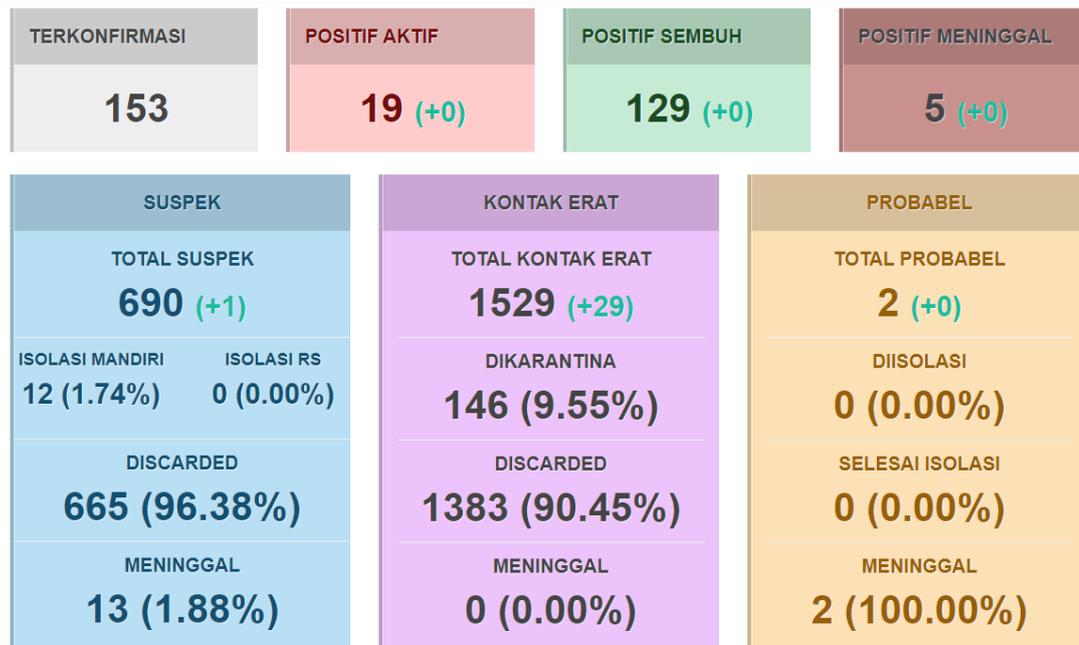
yang dituju perjalanan pariwisata. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari seberapa besar kompleksitas organisasi dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya (Pratiwi, Saleh, & Sentanu, 2019).

Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pariwisata juga salah satu sektor yang paling pesat pertumbuhannya. Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh World Travel and Tourism Council (WTTC), pada tahun 2010 sektor pariwisata mempekerjakan kurang lebih 235 juta orang di seluruh dunia serta berkontribusi sebesar 9,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) global. Di Indonesia, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 9,1 persen dari PDB dan secara langsung dan tidak langsung mempekerjakan lebih kurang 8,9 juta orang (multiplier effect). Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan, Indonesia memiliki sumber daya alam, manusia, dan budaya yang melimpah serta tersebar luas di berbagai daerah. Ini menjadikan sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi yang sangat cerah. Namun agar potensi ini dapat dioptimalkan, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh serta kerja sama yang erat di antara para pemangku kepentingan pariwisata, yang terdiri dari pemerintah, wisatawan, pelaku bisnis pariwisata, dan masyarakat, papar Mari dalam jumpa pers menjelang berlangsungnya Konferensi Pariwisata Nasional. (kemenparekraf.go.id).

Begitupula dengan Pantai Pangandaran selama ini di kenal sebagai Kawasan Wisata Pantai Selatan Pulau Jawa yang selalu penuh dengan turis mancanegara maupun turis dalam negeri. Pantai dengan pasir putih dan ombak yang besar merupakan daya tarik bagi wisatawan. Kawasan Pantai Pangandaran merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak pandemic covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kunjungan wisatawan mancanegara pada Maret 2020 turun sebesar 45,50 persen, dibandingkan bulan Februari 2020. Dibandingkan pada Maret 2019, jumlah kunjungan wisman pada Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11 persen (suaramerdeka.news). Namun hal ini tampak berbeda dengan Kawasan Pantai Pangandaran. Pemerintah Kabupaten Pangandaran tetap membuka diri terhadap kunjungan wisatawan ke Pantai Pangandaran. Peningkatan kasus Covid-19 secara nasional belum mempengaruhi otoritas terkait untuk mengubah kebijakan di objek wisata itu.

Berdasarkan website resmi kabupaten pangandaran, jumlah penyebaran covid-19 per 13 Desember 2020 terdapat sebanyak terkonfirmasi 153 orang, positif aktif sebanyak 19 orang, sembuh sebanyak 129 orang dan positif meninggal 5 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber: <https://covid19.pangandarankab.go.id/>

Bagan 1.1.
Angka Kejadian Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa Kabupaten Pangandaran belum termasuk zona merah, sehingga masih mengambil kebijakan untuk membuka sektor pariwisata yang merupakan sektor penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Terdapat lima sector obyek wisata yang menjadi andalan dalam menyumbang penerimaan PAD Kabupaten Pangandaran yaitu Pantai Karapyak, Pantai Pangandaran, Pantai Batu Hiu, Pantai Batukaras dan Green Canyon.

Tabel 1.1.

Data Penerimaan PAD dari Sektor Obyek Wisata Kabupaten Pangandaran

No	Objek Wisata	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Pantai Pangandaran	4.065.960.000	10.307.735.000	13.949.525.000	13.326.055.000
2.	Pantai Batu Hiu	246.540.000	780.510.000	1.090.380.000	902.520.000
3.	Pantai Batukaras	858.095.000	2.277.760.000	2.976.225.000	2.604.620.000
4.	Green Canyon	451.413.750	787.453.505	829.480.505	698.150.000
5.	Pantai Karapyak	110.029.400	445.283.500	968.037.000	941.523.000

Sumber: Data BPS diolah, 2020

Berdasarkan statistik penerimaan PAD menurut data BPS Kabupaten Pangandaran bahwa dari obyek wisata Pantai Pangandaran pada tahun 2016 berhasil mendapat PAD Rp4.065.960.000; dan pada tahun 2017 naik menjadi Rp10.307.735.000; kemudian, pada tahun 2018 naik hingga Rp13.949.525.000 dan pada tahun 2019 turun sedikit menjadi Rp13.326.055.000.

Objek Wisata Pantai Batu Hiu juga mengalami kenaikan yang mulai pada, tahun 2016 Penerimaan PAD sebesar Rp246.540.000; pada tahun 2017 mengalami

kenaikan menjadi Rp.780.510.000; kemudian tahun 2018 naik menjadi Rp.1.090.380.000; namun pada tahun 2019 agak turun menjadi Rp902.520.000.

Objek Wisata Pantai Batukaras, pada tahun 2016 dapat memperoleh PAD sebesar Rp.858.095.000; pada tahun 2017 naik dengan pesat menjadi Rp.2.277.760.000; kemudian pada tahun 2018 naik menjadi sebesar Rp.2.976.225.000, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sedikit menjadi sebesar Rp.2.604.620.000.

Hal yang sama juga pada penerimaan PAD dari objek wisata Green Canyon, yang pada tahun 2016 sebesar Rp.451.413.750; naik pada tahun 2017 menjadi Rp.787.453.505; kemudian tahun 2018 juga mengalami kenaikan menjadi Rp.829.480.505; namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.698.150.000. Sementara, dari objek wisata Pantai Karapyak penerimaan PAD tercatat pada tahun 2016 mencapai Rp.110.029.400; pada tahun mengalami kenaikan menjadi 2017 Rp.445.283.500; kemudian pada tahun juga naik menjadi 2018 Rp.968.037.000; namun pada tahun 2019 juga mengalami penurunan menjadi Rp.941.523.000.

Untuk tahun 2020 akan juga mengalami penurunan yang drastis akibat penurunan jumlah wisatawan yang datang Kabupaten Pangandaran. Hal ini juga berpengaruh pada masyarakat dan pelaku ekonomi di Kabupaten Pangandaran yang kesehariannya tergantung pada wisatawan yang datang di lokasi wisata di Pangandaran. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan selain dari jumlah penyebaran Covid-19 yang kurang, membuat Pemerintah Kabupaten mengeluarkan kebijakan untuk tetap membuka sektor pariwisata di Pangandaran.

Namun kebijakan untuk tetap membuka sektor pariwisata tetap didukung dengan kebijakan protokol kesehatan yang ketat bagi pelaku usaha dan masyarakat di

Kabupaten Pangandaran. Hal ini didukung dengan kebijakan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dan Adaptasi Kebiasaan Baru. Peraturan Bupati ini diterbitkan dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam pelaksanaan PSBB dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai fenomena gejala pemerintahan sebagaimana yang diuraikan di atas dengan judul “*Penyelenggaraan Dynamic Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran*”.

1.2. Permasalahan

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan protokol kesehatan di masa pandemic covid-19 berdampak pada sektor wisata di Pangandaran
- 2) Masih terdapatnya penyebaran covid-19 di Kawasan Wisata Pangandaran
- 3) Kawasan wisata Pangandaran masih tetap buka di masa pandemic covid
- 4) Pandemi covid menurunkan jumlah wisatawan di Pangandaran
- 5) Menurunnya penerimaan PAD Sektor Pariwisata di Kabupaten Pangandaran

1.2.2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis membatasi masalah pada *Dynamic Governance* Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.

1.2.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan permasalahan tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penyelenggaraan *Dynamic Governance* dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran?
- 2) Bagaimana dukungan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan *Dynamic Governance* dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.
- 2) Untuk mengkaji dan mengetahui dukungan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian, maka manfaat penelitian ini terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai kegunaan positif, diantaranya:

- 1) Kegunaan akademis hasil penelitian ini sebagai sumbangan perkembangan guna menambah khazanah keilmuan akademisi tentang Dynamic Governance dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi penelitian lebih lanjut khususnya pengembangan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan pemerintahan.
- 2) Kegunaan praktis penelitian ini bertujuan memberikan sebuah wacana pemahaman tentang pentingnya tata kelola pemerintahan dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran, pentingnya penerapan protocol kesehatan termasuk pada kawasan wisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1. Tinjauan Penelitian Terkait Sebelumnya

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun jurnal-jurnal penelitian dalam rangka menggali suatu informasi yang ada sebelumnya mengenai teori yang berkaitan dengan judul penelitian, sehingga digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Bayu Mitra Adhyatma Kusuma, (2005). meneliti masalah Urgensi Dynamic Governance Dalam Meningkatkan Profesionalisme Manajemen Penyelenggaraan Haji. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana suatu dinamika dapat diciptakan dalam suatu kebijakan atau program yang dihasilkan institusi pemerintahan khususnya Kemenag.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki makna multi aspek meliputi ritual, politik psikologis, dan sosial. Dikatakan sebagai aspek ritual karena ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat istitha'a. Dari aspek psikologi politik, negara bertanggung jawab atas pelaksanaan agenda keagamaan termasuk penyelenggaraan ibadah haji. Dari aspek sosial, masyarakat beranggapan bahwa haji memberikan implikasi lebih kepada setiap individu dibandingkan dengan orang yang belum pernah berhaji. Namun penyelenggaraan haji selalu menyisakan persoalan terutama terkait dengan manajemen pengelolaannya. Oleh karena itu Dynamic

Governance sangatlah urgen untuk diterapkan dalam upaya meningkatkan profesionalisme manajemen penyelenggaraan haji.

Peneliti lainnya yaitu Mazidah, Alifatu Lela, dkk (2019) meneliti masalah Analisis Dynamic Governance Pada Program Layanan Layad Rawat Di Dinas Kesehatan Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dinamis pada program "Layad Rawat" di Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, program Layanan Layad Rawat sudah sesuai dengan konsep Dynamic Governance. Karena program ini diadakan untuk menjawab tantangan dengan menyesuaikan program atau kebijakan dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya kecepatan tanggapan. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, tetap hingga saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung terus melakukan pembaharuan melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan setiap tahunnya.

Peneliti lainnya yang meneliti dynamic governance dilakukan oleh Ayuning Budiati dkk (2019), yang meneliti mengenai Kesiapan Pelaksanaan "Dynamic Governance" Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan "Dynamic Governance" dalam peningkatan kualitas pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Kesiapan pelaksanaan *thinking Ahead, thinking again*

dan thinking across di Kantor BPJS Kabupaten Lebak masih sangat terbatas karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta komitmen pimpinan. Hal ini misalnya nampak pada pelaksanaan Dynamic Governance di Kantor BPJS Kabupaten Lebak adalah kenggan masyarakat untuk menggunakan kartu BPJS, karena seringkali mendapati waktu pelayanan yang lama, lokasi yang jauh, juga harus mengantri, disamping akses dan daya jangkau pelayanan BPJS yang masih terbatas ke masyarakat yang tinggalnya jauh dari Ibukota Kabupaten Lebak.

Penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan; *pertama*, untuk mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan *Dynamic Governance* dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran. Dan *kedua*, untuk mengkaji dan mengetahui Kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penerapan protocol kesehatan di Kawasan Wisata Pangandaran, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Perbedaan Pokok Kajian Penelitian

No.	Nama/Tahun/Judul	Tujuan Penelitian	Keterangan
1.	Bayu Mitra Adhyatma Kusuma (2005) <i>Urgensi Dynamic Governance Dalam Meningkatkan Profesionalisme Manajemen Penyelenggaraan Haji</i>	untuk mengkaji bagaimana suatu dinamika dapat diciptakan dalam suatu kebijakan atau program yang dihasilkan institusi pemerintahan khususnya Kemenag.	Menganalisis pentingnya <i>dynamic governance</i> dalam manajemen penyelenggaraan haji
2.	Mazidah, Alifatu Lela, dkk 2019, <i>Analisis Dynamic Governance Pada Program Layanan Layad Rawat Di Dinas Kesehatan Kota Bandung</i>	untuk menganalisis tata kelola dinamis pada program "Layad Rawat" di Dinas Kesehatan Kota Bandung.	Menganalisis pada layanan rawat jalan, bukan penanganan penyebaran penyakit (pandemi)

3.	Ayuning Budiati dkk (2019), <i>Kesiapan Pelaksanaan “Dynamic Governance” Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lebak Provinsi Banten</i>	untuk mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan “Dynamic Governance” dalam peningkatan kualitas pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lebak Provinsi Banten.	Menganalisis dalam kesiapan pelaksanaan DG dan peningkatan kualitas layanan BPJS, bukan pada penanganan pandemic
4.	Udaya Madjid dkk, 2020, <i>Penyelenggaraan Dynamic Governance dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.</i>	-Untuk mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan <i>Dynamic Governance</i> dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran. - Untuk mengkaji dan mengetahui Kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penerapan protocol kesehatan di Kawasan Wisata Pangandaran.	Menganalisis masalah DG dalam penanganan pandemi pada lokasi wisata

Sumber: berbagai sumber, diolah

Berdasarkan pada tabel tersebut terlihat perbedaan pokok bahasan penelitian ini dengan pokok bahasan penelitian lainnya, Mazidah, Alifatu Lela, dkk membahas mengenai pentingnya *dynamic governance* dalam manajemen penyelenggaraan haji, Mazidah, dkk membahas pada layanan rawat jalan, bukan penanganan penyebaran penyakit (pandemi), dan Ayuning Budiati dkk, membahas mengenai kesiapan pelaksanaan DG dan peningkatan kualitas layanan BPJS sementara penelitian ini membahas masalah DG dalam penanganan pandemi pada lokasi wisata dan Kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penerapan protocol kesehatan .

2.2. Tinjauan Teoritik Terkait

Pada sub pembahasan ini penulis kemukakan kajian kepustakaan mengenai teori yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu konsep tata kelola pemerintahan dan pandemic covid. Sehingga dapat jelas tergambar dalam sub bab kerangka penelitian yang di ajukan oleh penulis pada bahasan selanjutnya.

2.2.1. Pemerintahan

2.2.1.1. Pemerintahan

Kata “pemerintahan” berasal dari kata “perintah”, kata perintah tersebut mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an”. Sehingga menjadi kata benda “pemerintah” dan pemerintahan. Pemaknaan pemerintahan oleh Sadjijono (2008:41) menjelaskan bahwa Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau government, yakni penyelenggaraan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit (*bestuurvoering*), yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja.

Pemerintah merupakan organ (perlengkapan atau alat-alat) yang memerintah atau kekuasaan untuk memerintah, sedangkan pemerintahan lebih mengacu pada perbuatan memerintah. Pemerintah di sini juga menunjukkan arti badan atau lembaganya dan pemerintahan menunjukkan arti fungsinya. (Wasistiono, 2009:1.5)

Sementara, Menurut Suhady (2009:197), pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs*

of men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya

Kemudian Ermaya Suradinata (1998) mendefinisikan pemerintahan secara lebih sederhana sebagai berikut: government is the best defined as the organized agency of the state, expressing and exercising its authority artinya pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah lembaga negara terorganisasi yang menunjukkan dan menjalankan wewenang atau kekuasaannya. Pendapat tersebut menjelaskan tentang kekuasaan dalam pemerintahan sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan tanpa kekuasaan tidak mungkin akan dapat berjalan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa pemerintahan mempunyai dua makna, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Makna kata “pemerintahan” dalam arti luas berarti pelaksanaan tugas orang, badan, lembaga yang bertindak untuk dan atas nama negara dan diberikan wewenang dalam mencapai tujuan dari negara tersebut. Sementara dalam arti sempit berarti organisasi yang berfungsi sebagai pemerintah atau pelaksana eksekutif

Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang terlibat,
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah,
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat,
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafiie, 2011: 61).

Kemudian Setiawan (2020:4) memaknai kata pemerintahan tersebut ke dalam dimensi-dimensi pemerintahan sebagai berikut:

- a. orang atau sekelompok orang yang diperintah dalam suatu negara (rakyat)
- b. sekelompok orang yang memerintah dalam suatu negara (pemerintah)
- c. adanya perintah yang diterima dan dipatuhi (kebijakan/peraturan dan implementasinya)
- d. kewenangan yang diberikan kepada sekelompok orang yang memerintah (kewenangan)
- e. membantu memenuhi kebutuhan (pelayanan)

S.E. Finer (Finer, 1974 dalam Sumaryadi, 2010: 18) mengklasifikasikan pemerintah ke dalam 4 (empat) pengertian, yakni:

1. Pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang.
2. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan.
3. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan.
4. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Peranan pemerintahan dalam proses kehidupan manusia diakui oleh dunia dalam perjalanan sejarah manusia. Pemerintah mempunyai peranan penting guna menciptakan keamanan, pengaturan dalam urusan keagamaan dan mengontrol perkembangan ekonomi serta menjamin terlaksananya proses kehidupan sosial.

Bilamana masyarakat berkembang dan menjadi lebih kompleks, pemerintahan juga berkembang menjadi lebih kompleks. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks kybernology, Ndraha (2008) berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensi (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi 3 (tiga) peran, yaitu:

- 1) meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru sebagai peran SubKultur Ekonomi (SKE);
- 2) mengontrol SKE, memberdayakan, dan meredistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh SKE, melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Sub Kultur Kekuasaan (SKK);
- 3) Mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP)

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip oleh Tarsito (1978: 10): “Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar”.

Berdasarkan tujuan pemerintahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat jelas beberapa fungsi-fungsi dalam proses tersebut. Melihat gejala dan peristiwa pemerintahan sebagaimana yang diutarakan para ahli pemerintahan, maka Istianto (2011:22) mengemukakan fungsi pemerintah antara lain:

1. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah artinya Pemerintah yang berfungsi sebagai leader (pemimpin) dan educator (pendidik). Para pamong, diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat;
2. Serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah yang baik adalah mengerti apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan masyarakatnya;
3. Menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama artinya pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator masyarakat. Sebagai katalisator artinya sebagai penghubung bagi setiap kelompok kepentingan di masyarakat. Sedangkan sebagai dinamisator artinya penggerak segala bentuk kegiatan bermasyarakat;
4. Menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang artinya pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, jangan sampai lengah terhadap keinginan yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak pemerintah yang jatuh atau hancur akibat tidak peka terhadap perubahan;
5. Melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Artinya pemerintah bertugas merancang dan atau membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Tidak kalah pentingnya, pemerintah harus mengimplementasikannya dengan benar mempersiapkan perangkat dan sumber daya yang terbaik.

Fungsi pemerintah dalam pelayanan publik tidak lepas dari hakikat tujuan negara pada mulanya, yaitu mengatur berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara masyarakat itu sendiri. Kemudian seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat maka negara memerlukan suatu institusi yang

mengatur kepentingan itu. Hal ini diungkapkan oleh Ryaas Rasyid (1996) bahwa pemerintah merupakan personifikasi negara, sedangkan birokrasi dan aparaturnya merupakan personifikasi pemerintah. Ungkapan tersebut mungkin terlalu sederhana dan tidak dapat dipungkiri bahwa pihak yang paling aktif dalam kegiatan pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari adalah birokrasi yang berperan sebagai pelaksana keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin politik. (Wasistiono, 2009: 1.13).

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengatur, memberdayakan dan melayani masyarakat. Pengaturan tersebut menekankan pada kewenangan yang melekat pada jabatan pemerintahan. Sedangkan Fungsi pelayanan menekankan pada pemenuhan kebutuhan publik, memudahkan urusan publik, mengefisienkan proses penyelenggaraan urusan publik, serta mengefektifkan barang public.

2.2.1.2. Pemerintahan Daerah

Lahirnya pemerintahan tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan yang awalnya untuk mengawal eksistensi kekuasaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut tunduk pada kekuasaan yang ada. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan negara yang semakin mengikuti perkembangan global sehingga kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat, maka peran pemerintah yang menganut demokrasi, mengalami perubahan paradigma menjadi pelayanan kebutuhan masyarakat. Paradigma pemerintahan yang demokratis dan modern, lebih menekankan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mendukung kekuasaan pemerintahan. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi

yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.

Semakin banyaknya kebutuhan dan semakin luasnya wilayah kekuasaan membuat negara membagi kekuasaan dengan pemerintahan yang lebih kecil. Penyelenggaraan pemerintahan di wilayah yang lebih kecil diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pelayanan dan mendekatkan jangkauan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa negara-negara, baik yang berbentuk kerajaan, federasi maupun republik membagi wilayahnya berdasarkan tujuan kondisi sosial politik dan letak geografi suatu negara. Pembagian negara merupakan pembagian wilayah suatu negara berdasarkan sistem tertentu dengan maksud untuk mempermudah administrasi, pemerintahan, dan hal-hal yang sehubungan dengan itu. Hasil dari pembagian tersebut dikenal dengan sebutan umum "subdivisi negara" atau pembagian negara. (Setiawan, 2018, 51)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemerintahan daerah. Syafiie (2011: 178-179) menguraikan asas-asas pemerintahan daerah tersebut sebagai berikut:

a) Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Yang dimaksud dengan sebagian urusan adalah karena tidak semua urusan dapat diserahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, misalnya penyerahan urusan pertahanan dan keamanan, karena akan menimbulkan keberanian daerah untuk melawan Pemerintah Pusat secara separatis, penyerahan urusan moneter akan membuat perbedaan dan kesenjangan pada mata uang, penyerahan urusan peradilan akan

membuat pemberontak yang dijatuhi hukuman oleh Pemerintah Pusat malahan menjadi pahlawan dalam peradilan di daerahnya.

Mengurus adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pihak eksekutif sehingga Pemerintah Daerah lalu membangun dinas-dinas sesuai urusan yang diserahkan. Sedangkan pengaturan adalah agar peraturan daerah dapat dibuat sendiri oleh Pemerintah Daerah dengan berdirinya lembaga legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keberadaan legislative daerah dan eksekutif daerah inilah yang kemudian mereka mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri.

b) Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat Pemerintah Pusat atau pejabat di atasnya (misalnya pada wilayah provinsi) jadi begitu suatu departemen di tingkat pusat melimpahkan wewenangnya kepada pejabat kepala kantor wilayah provinsi, atau pejabat kepala wilayah provinsi tersebut melimpahkan wewenang kepada kepala kantor departemen di tingkat kabupaten/kota, maka terkadang muncul egoisme sektoral karena Pemerintah Daerah tidak mengetahui pelaksanaan dan sulit untuk ikut mengawasinya. Misalnya dalam hal kemungkinan munculnya tumpang tindih pekerjaan, baik waktunya, biayanya misalnya antara pembangunan bongkar pasang jalan karena pemasangan pipa air minum, kabel telepon dan jaringan listrik.

c) Asas Tugas Pembantuan

Di satu pihak Pemerintah Pusat khawatir penyerahan semua urusan kepada daerah akan membuat daerah menjadi separatis, tetapi di pihak lain Pemerintah Daerah curiga karena Pemerintah Pusat akan merongrong kekayaan daerah maka tarikulur antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak pernah selesai dari dulu. Seperti diketahui desentralisasi pemerintahan pada zaman penjajahan sangat dibatasi,

sehingga aparat dekonsentrasi sangat kewalahan, misalnya dalam keuangan sangat kecil, yaitu sekedar membiayai tugas yang tidak penting, oleh karena itu dalam urusan pemerintahan tertentu Pemerintah Daerah diikutsertakan. Kata lain dari tugas pembantuan ini adalah Medebewind. Mede, dalam bahasa Belanda artinya ikut serta atau turut serta, sedangkan “bewind” juga dalam bahasa Belanda artinya berkuasa atau memerintah. Jadi, Pemerintah Daerah ikut serta mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui 3 (tiga) asas, yaitu: desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Keadaan ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu, maka keseimbangan dari ketiga asas tersebut senantiasa menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan dan pelaksana pembangunan daerah. Oleh karena itu, masalah pemerintahan daerah akan muncul ke permukaan sebagai salah satu isu yang banyak menarik perhatian untuk dibicarakan oleh kalangan luas, walaupun sekarang ini pelaksanaan pemerintahan daerah (otonomi daerah) lebih menunjukkan sebagai harapan daripada kenyataan.

Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah

2.2.1.3. Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Perubahan paradigma pemerintahan pasca era reformasi hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengarahkan pemerintah yang selama ini lebih cenderung pada adanya kekuasaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekarang ini berubah menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) melalui kegiatan pengaturan, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan pemerintahan.

Pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sehubungan dengan hal ini, dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia didirikan ialah untuk kemasalahatan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah sebagai pelaksana roda pemerintahan memiliki kewajiban untuk kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbagai panduan dan konsep dalam penatakelolaan pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik, di pusat maupun di daerah, termasuk dengan konsep *good governance*.

Maslan Rikun dkk (2018), mengemukakan bahwa *Good Governance* merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang universal, karena itu seharusnya diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Upaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* perlu dilakukan dalam penyelenggaraan. Ada masalah birokrasi yang dihadapi semua Pemerintahan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan *good governance* di dalam Pemerintahan Daerah, baik segi struktur dan kultur serta

nomenklatur program yang mendukungnya. Sampai sekarang penerapan prinsip *good governance* di pemerintah daerah masih bersifat sloganistik. Terjadinya krisis nasional dan berbagai persoalan di Indonesia antara lain disebabkan dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan terutama birokrasi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akibatnya timbul berbagai masalah seperti kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Bahkan kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi.

Namun perkembangan teori *good governance* mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman yang pesat. Berbagai pandangan para ahli mengenai tata kelola pemerintahan seperti *sound governance*, *dynamic governance*, dan, *sound governance*. Konsep-konsep tersebut ditawarkan para ahli untuk kemajuan tata kelola pemerintahan yang memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia konsep *sound governance*, *dynamic governance*, dan *open government* belum terlalu populer didegungkan, walaupun sebenarnya elemen-elemen konsep tersebut telah diimplementasikan ke dalam tata laksana pemerintahan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya ke tiga konsep tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2.

Konsep Tata Kelola Pemerintah

<i>Sound Governance</i>	<i>Dynamic Governance</i>	<i>Open Government</i>
<i>Dimensions</i>	<i>Elements</i>	<i>Three Pillars</i>
1. <i>Process</i> ; 2. <i>Structure</i> ; 3. <i>Cognition and Value</i> ; 4. <i>Constitution</i> ; 5. <i>Organization and Institution</i> ; 6. <i>Management and Performance</i> ; 7. <i>Policy</i> ; 8. <i>Sector</i> ; 9. <i>International and Globalization Forces</i> ; 10. <i>Ethics, Transparency, and Accountability</i> .	1. <i>Culture</i> ; <i>Institutional culture</i> 2. <i>Capabilities</i> ; <i>Thinking ahead, thinking again, thinking across</i> 3. <i>Change</i> ; <i>Adaptive policy</i> (Neo & Chen, 2007:13)	1. <i>Transparency</i> ; 2. <i>Collaborative</i> ; 3. <i>Participatory</i> . (Obama, 2009; Gasco, 2015; Wirtz & Birkmeyer, 2015)

(Farazmand, 2004:13)

Sumber: Lesmana Rian Andhika, 2017

Bila dilihat dalam perbandingan ketiga konsep tersebut, Dynamic Governance lebih sesuai untuk menjelaskan perubahan penyelenggaraan pemerintahan akibat perubahan lingkungan. Dinamisme (*dynamism*) pada hakekatnya merujuk pada kondisi adanya berbagai idea baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif. Atau Dengan kata lain bahwa, kondisi yang dinamis tersebut mendeskripsikan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang tiada akhir. Ketika kondisi dinamis itu menyangkut lembaga pemerintah, maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial- ekonomi di mana masyarakat, swasta dan pemerintah berinteraksi. Lembaga pemerintah yang dinamis ini mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan- aturan dan struktur-struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan- pembatasan untuk beragam aktivitas yang

berlangsung. Pada gilirannya, kemampuan ini akan dapat menopang dan memperkuat pembangunan dan kesejahteraan Negara (Neo & Chen, 2007:1).

Kemudian Neo dan Chen (2007:7) lebih lanjut menjelaskan bahwa governance menjadi dinamis manakala pilihan-pilihan kebijakan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terbaru dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Adaptasi ini lebih dari sekedar membuat perubahan sekali saja (*onetime change*) atau proses *recovery* dari sebuah kegagalan. Lebih dari itu, dinamis lebih bermakna sebagai “*on-going sustained change for long-term survival and prosperity.*”

Pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*) menjadi sebuah kapabilitas yang strategis yang perlu dimiliki oleh Pemerintah di berbagai Negara di dunia saat ini. Perubahan berbagai sektor dan aspek kehidupan pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk dapat meresponnya secara lebih efektif dan efisien. *Dynamic governance* menjadi landasan penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan Pemerintah yang adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan ini menjadi faktor esensial dalam konteks upaya Pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. (Mudiyati Rahmatunnisa; 2019).

Syafri, W, (2012:184) menjelaskan kerangka dasar *Dynamic Governance* dan elemen-elemennya adalah sebagai berikut:

- 1) Thinking Ahead

Thinking ahead berarti kemampuan mengidentifikasi faktor lingkungan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan masa mendatang, memahami dampaknya terhadap sosio ekonomi masyarakat. Proses berfikir kedepan meliputi:

1. Menggali berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap berbagai kecenderungan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap tujuan kebijakan
 2. Merasakan dampak pembangunan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sedang berjalan dan menguji efektivitas kebijakan, strategi, dan program sedang berjalan
 3. Menentukan pilihan-pilihan yang akan digunakan sebagai persiapan menghadapi timbulnya ancaman terhadap peluang yang baru
 4. Mempengaruhi para pembuat kebijakan kunci dan para pemangku kepentingan untuk memperhatikan isu-isu yang muncul secara serius dan mengajak mereka untuk membicarakan kemungkinan respon/tanggapan yang akan diambil.
- 2) *Thinking Again Thinking again* merupakan kemampuan meninjau kembali berbagai kebijakan, strategi dan program yang sedang berjalan. Kaji ulang dimaksudkan untuk melihat kelaikan dan kecocokan kebijakan, strategi dan program yang sedang berjalan dengan kondisi yang sedang dihadapi dan masa mendatang akibat perubahan lingkungan global yang cepat.
- 3) *Thinking Across* Proses berfikir *thinking across* atau melewati batas ini meliputi:
1. Mencari praktek-praktek implementasi suatu kegiatan yang kurang lebih sama
 2. Menggambarkan tentang apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, serta mengambil pelajaran dari pengalaman yang mereka lakukan
 3. Mengevaluasi apa yang diterapkan pada local value yang ada
 4. Mengungkapkan ide-ide baru

5. Menyesuaikan kebijakan dan program dengan kebutuhan setempat.

2.2.1.4. Tantangan Dinamic Governance

Apakah mungkin Pemerintah bisa dinamis? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan pada intinya mengungkap kontradiksi makna *dynamic governance* itu sendiri (*oxymoron*). Gambaran tentang Pemerintah pada umumnya sangat jauh dari perspektif dinamis. Sebaliknya, Pemerintah – khususnya birokrasi pemerintah – seringkali dipahami sebagai entitas yang lambat, birokrasi yang ketinggalan jaman, kaku dan tidak memiliki perhatian baik terhadap kepentingan dan kebutuhan individu maupun bisnis (Neo & Chen, 2007, p. 1). Kondisi ini bertolak belakang sekali dengan makna dinamis sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, yang dicirikan oleh ide-ide baru, persepsi-persepsi yang kekinian, upaya perbaikan yang terus-menerus, tindakan yang cepat dan responsif, daya adaptasi yang fleksibel, cepat dan eksekusi tindakan yang efektif, serta perubahan yang terus-menerus.

Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dapat menjadi dinamis melalui pemanfaatan landasan nilai dan keyakinan budaya yang bersinergi dengan kapabilitas organisasi yang kuat untuk menciptakan *dynamic governance system* yang memungkinkan perubahan yang terus-menerus. Sinergi kedua aspek tersebut menjadi hal yang sangat penting. Dijelaskan oleh Neo dan Chen (2007, p. 3) bahwa

Institutional culture can support or hinder, facilitate or impede dynamism in policy-making and implementation. Institutional culture involves how a nation perceives its position in the world, how it articulates its purpose, and how it evolves the values, beliefs and principles to guide its decision-making and policy choices. In addition, strong organizational capabilities are needed to consider thoroughly major policy issues and take effective action.

Dynamic governance sebagai output dari sinergi kedua elemen tersebut perwujudannya sangat bergantung pada upaya pemimpin untuk menata interaksi sosial

dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Dengan mengutip pendapat North, Neo dan Chen (2007, p. 12) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan hanya akan terjadi manakala terdapat “*leadership intention, cognition and learning which involve continual modification of perceptions, belief structures and mental models, particularly when confronted with global development and technological change.*” Oleh karenanya, dua hambatan utama untuk terwujudnya *dynamic governance* adalah ketidakmampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan untuk melakukan penyesuaian atas kelembagaan yang dibutuhkan agar tetap efektif. Bagaimana sesungguhnya interaksi berbagai elemen dalam mewujudkan *dynamic governance*?

Dynamic governance yang merupakan *outcome* yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (*adaptive policies*) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan *dynamic governance* adalah landasan nilai budaya (*institutional culture*) yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Tiga kapabilitas dinamis, yakni *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* yang memfasilitasi kebijakan-kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan.

Kapabilitas *think ahead* pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami konsekuensinya di masa datang terhadap tujuan ekonomi dan sosial, dan mengidentifikasi strategi investasi dan

pilihan yang tepat sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat mengeksplorasikan berbagai kesempatan baru dan mampu mengatasi berbagai potensi ancaman. Proses melakukan *thinking ahead* melibatkan:

- a) mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan,
- b) memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program yang ada,
- c) menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksplorasi peluang baru, dan
- d) mempengaruhi pengambil keputusan utama dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang akan dilakukan (Neo & Chen, 2007, pp. 32–33).

Kapabilitas *think again* menyangkut kemampuan untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada, untuk kemudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang lebih baik. Proses melakukan *thinking again* melibatkan:

- a) meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik,
- b) menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku, baik untuk memenuhi atau mengetahui target yang hilang,
- c) meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program untuk diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak,
- d) mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai, dan

- e) menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan lebih dan menikmati hasil yang berarti (Neo & Chen, 2007, p. 37).

Kapabilitas *think across* adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi internal agar tujuan dapat tercaai lebih baik. Kapabilitas *think across* melibatkan proses:

- a) mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa,
- b) merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman,
- c) mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik, dan apa akan diterima oleh penduduk setempat;
- d) menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inovatif untuk masalah yang muncul, dan
- e) menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan lokal dan kebutuhan warga negara (Neo & Chen, 2007, pp.41-42).

Untuk dapat memiliki kapabilitas *dynamic governance*, terdapat dua pilar utama, yakni sumberdaya manusia yang mampu dan proses yang gesit dan responsif. *Governance system* sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal melalui ketidakpastian masa depan dan juga berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain (Neo & Chen, 2007, p. 13).

Dynamic governance tercapai melalui berbagai kebijakan yang diadaptasi secara terus-menerus terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adaptasi kebijakan (*policy adaptation*) bukan merupakan reaksi pasif terhadap tekanan yang

datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yang lebih baik; kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai manifestasi dari *dynamic governance* (Neo & Chen, 2007, p. 13).

Nilai-nilai kearifan lokal – nilai budaya, kepercayaan, tata kelembagaan dan kebiasaan – akan mempengaruhi perilaku. Kearifan lokal ini termanifestasi dalam norma-norma dan konvensi informal. Pada gilirannya, akan memainkan peran penting dalam proses perubahan dan adaptasi berbagai kebijakan. Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa asumsi mengenai keutamaan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan terhadap pentingnya relevansi global dan peran penting Negara dalam menciptakan kondisi untuk pertumbuhan, mempengaruhi pemikiran dan pendekatan terhadap pemerintahan. Pilihan kebijakan yang dibuat dibentuk oleh nilai-nilai budaya tentang integritas, meritokrasi, kemandirian, pragmatism, dan kehati-hatian pengelolaan keuangan (Neo & Chen, 2007, p. 14).

Dalam mewujudkan *dynamic governance*, peran pemimpin menjadi sangat penting. Dalam melakukannya, tidak hanya sekedar mengandalkan charisma dan upayanya sendiri saja, akan tetapi dengan membangun kapabilitas organisasi sehingga pengetahuan dan sumberdaya dapat secara sistematis dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai permasalahan (*effective action*). Yang dibutuhkan untuk mewujudkan *dynamic governance* adalah proses belajar dan berpikir yang baru, desain beragam pilihan kebijakan, pengambilan keputusan yang analitis, seleksi rasional atas pilihan kebijakan, dan efektif implementasi kebijakan. Disinilah peran pemimpin menjadi sangat penting. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berpikir kreatif dan

inovatif serta bekerja keras untuk memberikan setting yang tepat untuk mewujudkan *dynamic governance* (Neo & Chen, 2007, p. 14).

Upaya memperbaiki kinerja lembaga perlu diinisiasi oleh pemimpin organisasi. Untuk dapat mengambil keputusan dan pilihan yang tepat membutuhkan pemimpin organisasi yang memiliki “*necessary motivation, attitude, values, intellect, knowledge and skills to envision the future, develop strategic options and select paths that give the institution the greatest scope for survival and success.*”(Neo & Chen, 2007, p. 16).

Dynamic governance merupakan hasil dari niat kuat dan ambisi pemimpin untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang dinamis dengan kemampuan untuk mengelola berbagai elemen secara terintegrasi di tengah perubahan yang terus-menerus melalui strategi yang jelas, manajemen yang cerdas, belajar terus-menerus, dan mencari jalan yang adaptif dan relevan, serta eksekusi kebijakan yang efektif. Secara sistematis membangun kapabilitas semua orang yang terlibat dan juga proses untuk menjamin bahwa ide-ide baru yang inovatif terakomodasi dalam kebijakan, proyek dan program yang realistis, serta secara konsisten mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi untuk mengarah pada pencapaian tujuan (Neo & Chen, 2007, p. 30).

Pada intinya, *dynamic governance* terjadi manakala “*policy-makers constantly think ahead to perceive changes in the environment, think again to reflect on what they are currently doing, and think across to learn from others, and continually incorporate the new perceptions, reflections and knowledge into their beliefs, rules, policies and structures to enable them to adapt to environmental change.*”(Neo & Chen, 2007, p. 15). Kapabilitas dinamis inilah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan Singapura selama lebih dari empat dekade. *Dynamic governance* bisa

terwujud secara berkelanjutan ketika: “*there is a long-term commitment to and investments in building each of the elements in the system and designing the necessary linkages for them to work as a whole.*” Perlu digarisbawahi pula bahwa “[*t]he interdependent, interacting and reinforcing flows*” merupakan detak jantung dari dynamic governance. Tanpa itu, tidak akan pernah ada *dynamic governance*.

2.2.2. Pandemi Covid-19

2.2.2.1. Covid-19

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS - Penularannya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Gejalanya demam >38 C, batuk, sesak napas yang membutuhkan perawatan di RS. Gejala ini diperberat jika penderita adalah usia lanjut dan mempunyai penyakit penyerta lainnya, seperti penyakit paru obstruktif menahun atau penyakit jantung. (kemkes.go.id; 2020)

Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada COVID-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan COVID-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia (human to human), yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet.

Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu analisis mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1

pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar. (Zhu N, Zhang D, 2019)

Prinsip tatalaksana secara keseluruhan menurut rekomendasi WHO yaitu: Triase : identifikasi pasien segera dan pisahkan pasien dengan severe acute respiratory infection (SARI) dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang sesuai, terapi suportif dan monitor pasien, pengambilan contoh uji untuk diagnosis laboratorium, tata laksana secepatnya pasien dengan hipoksemia atau gagal nafas dan acute respiratory distress syndrome (ARDS), syok sepsis dan kondisi kritis lainnya.(WHO;2020)

Indonesia masih bergelut melawan virus Corona hingga saat ini, sama dengan negara lain di dunia. Jumlah kasus virus Corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Metode penyebaran virus ini sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Sehingga dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengembangkan aplikasi Peduli Lindungi yang berbasis android yang dapat di unduh secara bebas oleh masyarakat untuk membantu menangani penyebaran virus Corona yang semakin hari semakin merajalela. Makalah ini akan membahas, terkait tata cara penggunaan aplikasi Peduli Lindungi memiliki fitur aplikasi tracking yang dapat mendeteksi pergerakan terpapar Covid-19 selama 14 hari ke belakang. Berdasarkan hasil tracking

dan tracing, masyarakat akan menerima warning untuk segera menjalankan protokol kesehatan apabila di sekitarnya terdapat pasien positif Covid-19.

2.2.2.2. Protokol Kesehatan

Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir. (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020).

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan

penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

b. Unsur pencegahan (prevent)

- 1) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.
- 2) Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

c. Unsur penemuan kasus (detect)

- 1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

- d. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (respond) Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (outdoor/indoor), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihakpihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.

New normal hadir untuk memastikan respons berbagai aspek dalam masyarakat yang dimulai dari makro, meso, dan mikro dan efisiensi adaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini akan memastikan kesiapan masyarakat dalam membangun kembali apa yang telah dibuat rubuh oleh suatu krisis maupun pandemi dengan kondisi yang lebih kuat (Buheji & Ahmed, 2020)

Rakyat Indonesia sendiri belum begitu siap dalam menyambut new normal secara efisien dan efektif dikarenakan kasus-kasus ketidaktaatan terhadap protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 yang mungkin akan terjadi pula pada new normal, meskipun ketaatan terhadap protokol kesehatan sangat diperlukan guna

memulihkan kondisi sosial dan ekonomi Indonesia sembari menekan laju kasus COVID-19 di Indonesia. (Enrico WBH Marpaung: 2020)

2.2.3. Kebijakan Pariwisata

Wisata dapat didefinisikan sebagai aktivitas rekreasi untuk merelaksasikan pikiran dari pekerjaan rutin. Mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, wisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan kepariwisataan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Keindahan alam baik secara fisik maupun keanekaragaman hayati merupakan hal

penting untuk keberlangsungan aktivitas pariwisata. Mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia, yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Goeldner menemukan, arti kebijakan pariwisata sering diabaikan dalam memastikan keberhasilan tujuan pariwisata, dibandingkan kegiatan memasarkan pariwisata, karena kebijakan pariwisata bertujuan menciptakan iklim di mana kolaborasi diantara banyak pemangku kepentingan di bidang pariwisata didukung dan difasilitasi. Dalam istilah Goeldner, kebijakan pariwisata memenuhi enam fungsi, yaitu: Pertama, mendefinisikan aturan permainan, istilah-istilah dimana operator pariwisata harus berfungsi; Kedua, menetapkan kegiatan dan perilaku yang dapat diterima bagi pengunjung; Ketiga, memberikan arahan dan panduan umum untuk semua pemangku kepentingan pariwisata dalam suatu tujuan; Keempat, memfasilitasi konsensus di sekitar strategi dan tujuan khusus untuk tujuan tertentu; Kelima, menyediakan kerangka kerja untuk diskusi publik/swata tentang peran dan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi dan masyarakat secara umum; dan Keenam, memungkinkan pariwisata untuk berinteraksi secara lebih efektif dengan sektor ekonomi lainya (Nugroho,2018:74).

Sektor pariwisata terus menunjukkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dunia. Menurut Forbes (2019), sektor ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan semua sektor lain dan menyumbang 8,8 triliun dolar Amerika Serikat pada Produk Domestik Bruto (PDB) global tahun 2018. Selain itu, ada 319 juta pekerjaan baru tercipta di sektor ini pada tahun yang sama. Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa terbesar bagi negara. Bahkan, pada akhir tahun 2019,

pendapatan sektor ini diperkirakan mencapai 17,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan kata lain, pariwisata akan melampaui sektor unggulan di atasnya, yaitu kelapa sawit. Menurut Menteri Pariwisata periode 2014-2019, dulu ketika migas berjaya pada era 1980-an, kita menyebut dua sumber devisa terbesar adalah migas dan non migas. Sekarang, kita ubah istilahnya menjadi sumber devisa pariwisata dan non pariwisata.

The World Travel and Tourism Council (WTTC) menyatakan pertumbuhan pariwisata Indonesia tertinggi ke-9 di dunia pada 2017. Dibandingkan dengan Malaysia (4%), Singapura (5,8%), dan Thailand (8,7%), pertumbuhan Indonesia di sektor ini jauh lebih tinggi, yaitu 22%. Namun, Vietnam lebih moncer lagi dengan 29% karena banyak melakukan deregulasi.

Para pelaku industri pariwisata sebenarnya menghadapi tantangan yang sangat besar pada abad ke-21. Konsumen membutuhkan produk-produk wisata yang lebih berkualitas. Mereka menginginkan tujuan wisata yang baru dan beda, lebih beragam, dan lebih fleksibel. Mereka mendambakan lingkungan yang bersih, pengalaman berwisata alam, kegiatan wisata petualangan, dan produk-produk wisata yang mencakup budaya, pusaka, dan sejarah (Edgell, 2016). Akibatnya, semakin banyak pihak yang tertarik untuk mengembangkan produk wisata yang berkualitas lebih tinggi dan memberi perhatian lebih besar pada lingkungan alam dan lingkungan binaan, termasuk situs sejarah dan budaya. Lebih jauh lagi, pengusaha dan pemerintah semestinya memperhatikan kelestarian sumber daya yang menjadi daya tarik wisata, bukan semata-mata mengeksploitasi untuk kepentingan sesaat. Pengelolaan sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan dimaksudkan tidak hanya memberikan manfaat bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi penerus.

Paradigma pariwisata berkelanjutan muncul seiring dengan perkembangan sektor pariwisata sejak lebih dari setengah abad lalu (Weaver, 2006) dan berkembang

sejak tahun 1990-an (Swarbrooke, 1998). Ini merupakan salah satu sektor dalam pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Dalam konteks ini, pengembangan pariwisata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan masa depan. Dengan kata lain, semua kalangan yang terlibat di dalamnya secara bijaksana menggunakan dan melestarikan sumber daya yang ada, agar bisa bermanfaat dalam jangka panjang. Dampak negatif dari kegiatan wisata ditekan sampai sekecil-kecilnya, sedangkan dampak positifnya dioptimalkan sebesar-besarnya.

2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

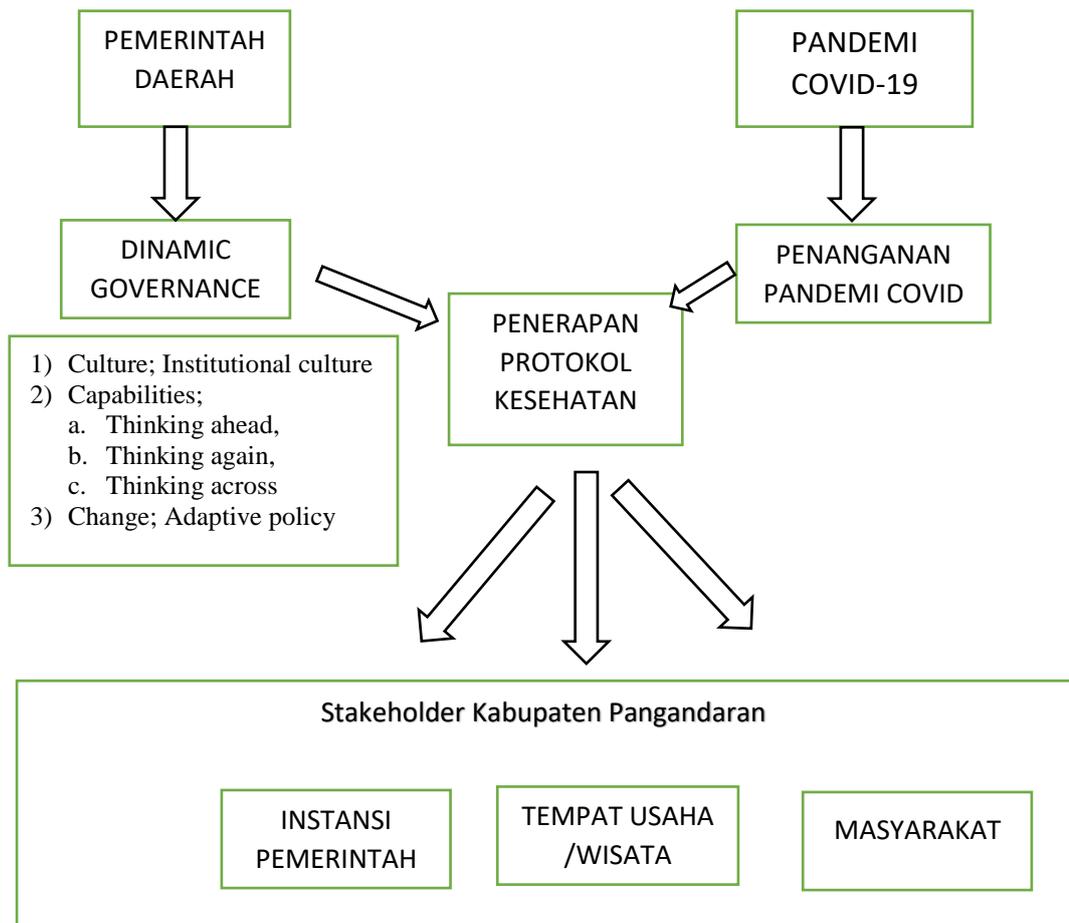
Untuk itu penerapan tata pemerintahan yang sesuai dengan lingkungan dan kondisi di masa pandemic ini yaitu melalui penerapan *Dynamic Governance* yang mampu dinamis dalam berbagai situasi. Boon dan Geraldine merumuskan dynamic governance sebagai bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan

lingkungan yang cepat sehingga kebijakan, institusi dan struktur tersebut tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Dimana Neo & Chen, (2007:13) mengemukakan 3 (tiga) elemen Dynamic Governance yaitu

1. Culture; Institutional culture
2. Capabilities; Thinking ahead, thinking again, thinking across
3. Change; Adaptive policy

Dalam penanganan covid, diperlukan pemerintahan yang dinamis yang selalu dapat melihat kebutuhan dari gejala-gejala pemerintahan. Dalam penanganan covid saat ini dalam era new normal diterapkan protokol kesehatan sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/382/2020, tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang menjadi suatu adaptasi kebiasaan baru baik bagi pemerintah, maupun masyarakat dan wirausaha.

Agus Pramusinto dalam mengemukakan bahwa ada tiga fase utama sebuah pemerintahan dinamis, yakni perbaikan internal pemerintah, peningkatan layanan publik, dan pemerintahan yang memperhatikan kebutuhan adaptif masyarakatnya (greater democracy). Dikatakan demikian, pemerintahan yang adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Pemerintahan yang dinamis adalah pemerintah yang bertindak progresif dan adaptif guna mewujudkan hasil yang efektif bagi daerah dan masyarakat yang dipimpinnya. Yang pasti, pemerintah harus bersikap aktif dalam membangun wilayahnya, bukan menunggu hasil laporan lapangan dan kemudian baru menentukan kebijakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar Kerangka Pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1.

KERANGKA PEMIKIRAN

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penentuan metode penelitian ditentukan oleh masalah yang di ajukan dalam penelitian, sehingga dalam penelitian ini, Misbahuddin dan Hasan (2013:4) mengatakan bahwa penelitian adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu/masalah dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari, secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga diperoleh sesuatu (seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya). Shah dalam Nazir (2009:99) mengemukakan pengertian desain penelitian, bahwa desain penelitian hanya mengenai pengumpulan data dan analisis data saja tetapi, dalam pengertian yang lebih luas, desain penelitian meliputi proses yaitu perencanaan penelitian atau proses penelitian.

Creswell (2013) mengatakan bahwa:

Qualitative research is an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. The process of research involves emerging questions and procedures, data typically collected in the participant's setting, data analysis inductively building from particulars to general themes, and the researcher making interpretations of the meaning of the data. The final written report has a flexible structure. Those who engage in this form of inquiry support a way of looking at research that honors an inductive style, a focus on individual meaning, and the importance of rendering the complexity of a situation...

Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif, penulis dapat menggambarkan dan menguraikan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya tentang penyelenggaraan dynamic governance dalam penanganan pandemic covid-19 secara

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, dan menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Creswell (2010: 20) menerangkan bahwa metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan antara lain: penelitian partisipatoris, analisis wacana, etnografi, grounded theory, studi kasus, fenomenologi, dan naratif.

3.2. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diformat ke dalam instrumen penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memahami sepenuhnya objek penelitian dan mengurangi bias yang mungkin ditimbulkan apabila peneliti tidak terjun langsung kelapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari para informan kunci dan data hasil observasi. Data primer diambil dari pemerintah Kabupaten Pangandaran yang berkaitan dengan penerapan dynamic governance, dan penanganan covid-19 .
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan, arsip dan dokumentasi serta data lain yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sumber data menurut Arikunto (2010: 114) adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dari penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis berasal dari data primer, yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui

wawancara, dan pengamatan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian maka harus ditentukan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Arikunto, (2010: 14), bahwa: sumber data diklasifikasikan menjadi 3 yaitu: person, place, dan paper. Keterangan singkat untuk ketiganya adalah sebagai berikut:

1. Person, sumber data berupa orang, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis.
2. Place, sumber data berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. keduanya merupakan objek untuk penggunaan metode observasi.
3. Paper, sumber data berupa simbol, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2014:211), bahwa “Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh yang diperlukan”. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis melakukan teknik pengumpulan data agar mendapat data, fakta serta sesuatu yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data sumber tertulis yang ada berupa catatan peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, atau arsip-arsip dan data monografi yang berhubungan dengan objek penelitian kemudian mempelajari yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara menurut Nazir (2014: 234) adalah: proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau si responde dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*, (panduan wawancara).

3. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan fenomena yang secara langsung berhubungan dengan sasaran yang diamati dan hanya membatasi pada persoalan yang ditanyakan. Dengan adanya observasi langsung diharapkan akan lebih melengkapi teknik wawancara yang diperkirakan sulit untuk dipertanyakan serta untuk memperkuat dan membenarkan data yang terkumpul melalui teknik wawancara. Hasil dari observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada.

3.4. Informan dan Subyek Penelitian

Guna memperoleh informasi yang jelas tentang dukungan penyelenggaraan dynamic governance dalam penanganan pandemic covid-19, sumber data yang berasal dari *person* diambil melalui penentuan subyek penelitian. Peneliti memilih subyek penelitian dengan cara *purposive*, yaitu pemilihan subyek secara sengaja oleh peneliti menurut kriteria dan pertimbangan tertentu peneliti. Kriteria yang ditentukan peneliti bahwa subyek-subyek yang dipilih adalah mereka yang lebih mengetahui dan dapat memberikan informasi tentang penyelenggaraan dynamic governance, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi sebagai data primer dalam penelitian ini.

Dalam menentukan subyek penelitian didahului dengan penentuan *Key Informan* yang membuka jalan untuk penelitian ini. *Key Informan* merupakan orang

yang paling berwenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan penyelenggaraan dynamic governance dalam penanganan pandemic covid-19, dan merupakan orang yang menjadi kunci pokok untuk mendapatkan data primer, karena dengan pertimbangan bahwa orang yang dijadikan *Key Informan* lebih banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya oleh *Key Informan* peneliti dibantu dalam menentukan subyek-subyek penelitian yang telah ditentukan, karena *Key Informan* lebih tahu orang-orang yang dapat memberikan data-data yang dibutuhkan peneliti untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini.

Sebagai *Key Informan* dalam penelitian ini adalah kepala satuan tugas covid, Kabupaten Pangandaran, dengan pertimbangan bahwa beliau merupakan orang yang berpengaruh besar dalam penyelenggaraan dynamic governance dalam penanganan pandemic covid-19, khususnya di lokasi penelitian.

Adapun subyek-subyek penelitian ini pada intinya mempunyai tugas dan andil yang besar dalam menentukan penanganan masalah sosial, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan kelembagaan, antara lain:

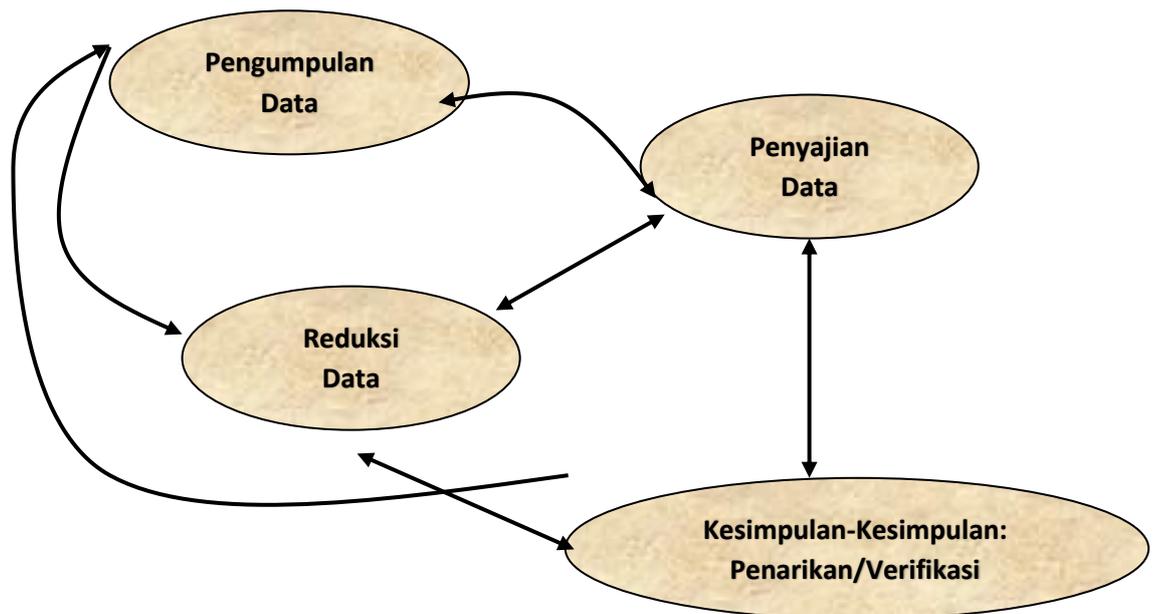
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
2. Kasatpol PP Kabupaten Pangandaran
3. Para petugas satgas covid
4. Pelaku usaha di Kabupaten Pangandaran
5. Masyarakat Pangandaran
6. Para Pengunjung di Lokasi Wisata Pangandaran

3.5. Teknik Analisis dan Penarikan Kesimpulan

M. Nazir (2014:419) mengatakan bahwa, analisis data merupakan kegiatan-kegiatan untuk mengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta mengikat

data sehingga mudah dibaca. Dalam menganalisis data, akan berlaku proses mengorganisasikan, mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan kerangka kerja seperti yang disarankan oleh data. Pengkategorian itu bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah terbaca dan dipahami sehingga mencapai suatu kesimpulan yang tepat dan tersusun secara sistematis.

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami sehingga mencapai suatu kesimpulan yang tepat dan tersusun secara sistematis. Dalam menganalisis data peneliti akan menggunakan Model Interaktif yang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1
Model Analisis Interaktif

Sumber: Matthew B. Miles & A.M. Huberman (1992: 20)

3.6. Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1. Tempat/Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi pada Kabupaten Pangandaran, di Khususnya pada lokasi wisata di Kabupaten Pangandaran, mengingat fenomena lokasi kawasan wisata berbeda dengan yang bukan Kawasan wisata sehingga penyelenggaraan dynamic governance dalam penanganan pandemic covid-19 yang terjadi dilokasi tersebut sangat menarik untuk dianalisis.

3.6.2. Jadwal Penelitian

Penulis membuat rencana melalui penjadwalan kegiatan penelitian untuk menghimpun data dan mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan thema penulisan penelitian ini. Jadwal penelitian direncanakan pada awal bulan Februari sampai dengan bulan September 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Parigi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat. Dengan potensi yang besar dibidang pariwisata maka misi Kabupaten Pangandaran yaitu

“Kabupaten Pangandaran Pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama”.

Adapun penunjang dalam merealisasikan visi dan misi tersebut tertera 6 poin prioritas diantaranya:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
- 2) Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
- 3) Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
- 4) Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal;
- 5) Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing; dan
- 6) Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Kota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Parigi. Kabupaten Pangandaran dengan luas wilayah keseluruhan sebesar + 1.010 km², dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan letak astronomis, Kabupaten Pangandaran terletak pada 108°8'0" sampai dengan 108°50'0" Bujur Timur dan 7°24'0" sampai dengan 7°54'20" Lintang Selatan. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Pangandaran berbatasan dengan wilayah berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Kabupaten Pangandaran adalah 1.011,04 km² dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan perhitungan garis lurus, jarak Kabupaten Pangandaran dengan ibukota Provinsi Jawa Barat yakni Kota Bandung adalah 211 km.

Kota yang paling dekat dengan Kabupaten Pangandaran adalah kota Banjar dengan jarak 84 km.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kabupaten Pangandaran Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Presentase
1	Cimerak	11.835	11,71
2	Cijulang	8.804	8,71
3	Cigugur	10.224	10,11
4	Langkaplancar	17.719	17,53
5	Parigi	9.804	9,7
6	Sidamulih	7.798	7,71
7	Pangandaran	6.077	6,01
8	Kalipucang	13.678	13,53
9	Padaherang	11.873	11,74
10	Mangunjaya	3.280	3,24
Kabupaten Pangandaran		101.092	100

Sumber: Kabupaten Pangandaran 2021

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, luas wilayah Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pangandaran terbesar yaitu Kecamatan Langkaplancar dengan luas wilayah sebesar 17.719 Ha dan presentase terhadap luas wilayah Kabupaten Pangandaran sebesar 17,53% Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah yang paling kecil terdapat di Kecamatan Mangunjaya dengan luas wilayah 3.280 Ha dan presentase terhadap luas wilayah Kabupaten Pangandaran sebesar 3,24%.

Secara administratif pada tahun 2021 Kabupaten Pangandaran terdiri dari 10 kecamatan dan 93 desa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Desa, RW dan RT di Kabupaten Pangandaran 2021

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	2020	Rukun Warga (RW) <i>Citizens Association</i>	Rukun Tetangga (RT) <i>Neighbourhood Association</i>	Ratio RT terhadap RW <i>Ratio</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cimerak	11	99	357	3,61
Cijulang	7	90	252	2,80
Cigugur	7	64	200	3,13
Langkaplancar	15	115	414	3,60
Parigi	10	122	399	3,27
Sidamulih	7	68	263	3,87
Pangandaran	8	90	344	3,82
Kalipucang	9	80	291	3,64
Padaherang	14	142	443	3,12
Mangunjaya	5	47	233	4,96
Pangandaran	93	917	3 196	3,49

Sumber: Kabupaten Pangandaran 2021

Berdasarkan tabel di atas, letak, luas dan batasan wilayah secara administrasi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 terdiri dari 10 kecamatan, 93 desa, 917 Rukun Warga dan 3.196 Rukun Tetangga. Kecamatan Padaherang memiliki jumlah RT dan RW terbanyak namun jumlah desa terbanyak ada di kecamatan Langkaplancar. Kecamatan Cimerak terdiri dari 11 desa, Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Cigugur terdiri dari 7 desa, Kecamatan Langkaplancar terdiri dari 15 desa, Kecamatan Parigi terdiri 10 desa, Kecamatan Sidamulih terdiri dari 7 desa, Kecamatan Pangandaran terdiri dari 8 desa, Kecamatan Kalipucang terdiri dari 9 desa, Kecamatan Padaherang terdiri dari 14 desa dan Kecamatan Mangunjaya terdiri dari 5 desa.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 sebanyak 3.586 orang. Dari jumlah tersebut, 1.705 orang adalah pegawai laki-laki dan 1.881 orang pegawai perempuan. Sebanyak 78 persen merupakan pegawai dengan lulusan sarjana. Pemerintah Kabupaten

Pangandaran menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan anggaran pemerintah daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik. Realisasi penerimaan Kabupaten Pangandaran tahun 2020 adalah 1.572,22 milyar rupiah. Sementara itu, realisasi pengeluaran Kabupaten Pangandaran tahun 2020 sebesar 1.547,37 milyar rupiah.

4.1.2. Sejarah Kabupaten Pangandaran

Pada awalnya Desa Pananjung Pangandaran ini dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari suku sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena gelombang laut yang kecil yang membuat mudah untuk mencari ikan. Karena di Pantai Pangandaran inilah terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung, tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai. Di sinilah para nelayan menjadikan tempat tersebut untuk menyimpan perahu yang dalam bahasa sundanya disebut andar setelah beberapa lama banyak berdatangan ke tempat ini dan menetap sehingga menjadi sebuah perkampungan yang disebut Pangandaran.

Pangandaran berasal dari dua buah kata “Pangan” dan “Daran” . yang artinya pangan adalah makanan dan daran adalah pendatang. Jadi Pangandaran artinya sumber makanan para pendatang. Lalu para sesepuh terdahulu memberi nama Desa Pananjung, karena menurut para sesepuh terdahulu di samping daerah itu terdapat tanjung di daerah inipun banyak sekali terdapat keramat-keramat di beberapa tempat. Pananjung artinya dalam bahasa sunda Pangnanjung-nanjungna (paling subur atau paling makmur) Pada mulanya Pananjung merupakan salah satu pusat kerajaan,

sejaman dengan kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putrapinggan sekitar abad XIV M. setelah munculnya kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor.

Nama rajanya adalah Prabu Anggalarang yang salah satu versi mengatakan bahwa beliau masih keturunan Prabu Haur Kuning, raja pertama kerajaan Galuh Pangauban, namun sayangnya kerajaan Pananjung ini hancur diserang oleh para Bajo (Bajak Laut) karena pihak kerajaan tidak bersedia menjual hasil bumi kepada mereka, karena pada saat itu situasi rakyat sedang dalam keadaan paceklik (gagal panen). Pada tahun 1922, penjajahan Belanda oleh Y. Everen (Residen Priangan) Pananjung dijadikan taman baru, pada saat melepaskan seekor banteng jantan, tiga ekor sapi betina dan beberapa ekor rusa. Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis-jenis tanaman langka, agar kelangsungan habitatnya dapat terjaga maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 Ha.

Pada tahun 1961 setelah ditemukannya Bunga Raflesia padma status berubah menjadi cagar alam. Dengan meningkatnya hubungan masyarakat akan tempat rekreasi maka pada tahun 1978 sebagian kawasan tersebut seluas 37, 70 Ha dijadikan Taman Wisata. Pada tahun 1990 dikukuhkan pula kawasan perairan di sekitarnya sebagai cagar alam laut (470,0 Ha) sehingga luas kawasan pelestarian alam seluruhnya menjadi 1000,0 Ha. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 104/KPTS-II/1993 perusahaan wisata Taman Wisata Alam Pananjung, Pangandaran diserahkan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam kepada Perum Perhutani dalam pengawasan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, bagian Kemangkuan Hutan Pangandaran.

Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis – jenis tanaman langka, agar kelangsungan habitatnya dapat terjaga maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan

suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 Ha. Pada tahun 1961 setelah ditemukannya Bunga Raflesia padma status berubah menjadi cagar alam. Dengan meningkatnya hubungan masyarakat akan tempat rekreasi maka pada tahun 1978 sebagian kawasan tersebut seluas 37,70 Ha dijadikan Taman Wisata. Pada tahun 1990 dikukuhkan pula kawasan perairan di sekitarnya sebagai cagar alam laut (470,0 Ha) sehingga luas kawasan pelestarian alam seluruhnya menjadi 1000,0 Ha. Perkembangan selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 104/KPTS-II/1993 perusahaan wisata TWA Pananjung Pangandaran diserahkan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam kepada Perum Perhutani dalam pengawasan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, bagian Kemangkuan Hutan Pangandaran.

Dengan luasnya wilayah, pengelolaan pelayanan terhadap warga menjadi jauh tidak efisien (bayangkan, penduduk di Pangandaran, atau bahkan Cijulang, perlu menempuh tiga jam perjalanan paling minimal, untuk mengurus Surat Izin Mengemudi atau Nomor Pokok Wajib Pajak ke Ciamis). Ciamis merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah yang sangat luas dan perlu untuk dimekarkan.

Kedua, sebagai kota tujuan wisata, sudah saatnya Pangandaran mengelolasecara mandiri potensi-potensinya. Sudah menjadi kecenderungan umum di dunia, kota-kota wisata bersifat mandiri sehingga mereka bisa maksimal membranding namanya di dunia pariwisata. Hal ini tentu tak akan maksimal jika Pangandaran masih mengikuti kabupaten induknya. Karena, seperti kita ketahui potensi ekonomi Kabupaten Ciamis tidak seluruhnya berasal dari pariwisata. Kabupaten Ciamis harus membagi pengelolaan (pelayanan maupun finansialnya) dengan daerah-daerah lain di wilayahnya. Kondisi ini memang tak terelakan. Hasilnya kita lihat, pembangunan Pangandaran sebagai kota wisata tak memiliki kemajuan yang

berarti. Ketiga, pembentukan Kabupaten Pangandaran bisa melengkapi strategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah pusat.

Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah pariwisata baik objek wisata pantai maupun sungai. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Pangandaran yaitu : pantai pangandaran, taman wisata alam (cagar alam pananjung), pantai batu hiu, pantai batu karas, pantai madasari, pantai karapyak, dan wisata sungai yaitu cukang taneuh (green canyon), citumang, santirah. Tersedia fasilitas hotel dengan kelas yang bervariasi dan cukup lengkap, restoran dan tempat hiburan lainnya.

Selain potensi pariwisata ternyata Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pertanian yang cukup memadai. Luas sawah di Kabupaten Ciamis berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Ciamis pada Tahun 2012 tercatat 51.903 Ha dan 26 persen ada di Kabupaten Pangandaran atau sekitar 13 ribu Ha dengan sawah irigasi dan tadah hujan. Pertanian tanaman padi (sawah dan ladang) merupakan komoditas utama di sektor pertanian. Data produksi tanaman padi (sawah dan ladang) tahun 2012 Kabupaten Ciamis tercatat 688.891 ton dan 31 persen disumbang dari produksi Kabupaten Pangandaran atau mencapai 214.044 ton. Sub sektor pertanian palawija Kabupaten Pangandaran juga tidak kalah potensial untuk ditingkatkan dengan jumlah produksi pada tahun yang sama dengan komoditas unggulan jagung 6.152 ton, ubi kayu 11.300 ton, ubi jalar 2.520 ton, kacang tanah 752 ton, kacang kedelai 2.084 ton, kacang hijau 725 ton dan komoditas lainnya.

Belum lagi potensi komoditas hortikultura yang bisa dikembangkan. Luas areal pemeliharaan ikan pada tahun 2012 di Kabupaten Pangandaran untuk tambak sebesar 44 Ha, kolam/empang 339 Ha, sawah 18,30 Ha. Ditinjau dari jumlah produksi

ikan menurut tempat pemeliharaan/penangkapan di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 yaitu perikanan laut 2.219,91 ton, Tambak 687,8 ton, kolam 2.767,38 ton, sawah 40 ton. Sedangkan nilai produksi ikan laut hasil penangkapan nelayan yang masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2012 mencapai 2.220 ton dengan nilai 43,03 milyar. Sebuah potret potensi perikanan yang menjanjikan untuk dikelola dan mampu meningkatkan taraf hidup penduduk Kabupaten Pangandaran. Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Pangandaran Tahun 2012 terhitung, yaitu sapi 26.807 ekor, kerbau 2.321 ekor, kuda 91 ekor, domba 95.062 ekor, dan kambing 49.438 ekor. Luas hutan Kabupaten Ciamis tersebar di beberapa BKPH/RPH meliputi Ciamis (Madati, Cikoneng, Panjalu, Kawali); Banjar Utara (Gadung, Bunter, Rancah); Banjar Selatan (Pamarican, Cicapar, Banjarsari); Pangandaran (Kalipucang, Pangandaran, Cisoladah) dan Cijulang (Parigi, Cigugur, Langkap). Luas hutan baik yang sudah dikukuhkan maupun yang belum seluas 28.898,73 Ha. PKPH/RPH wilayah Cijulang memiliki luas hutan terluas yaitu sebesar 9.299,88 Ha yang tersebar di kecamatan Cijulang, Parigi, Cigugur, dan Langkaplancar. Hutan terluas berada di gunung Gadung, Cigugur yang mencapai 3.168,9 Ha. Selain hutan yang dikelola PKPH/RPH, terdapat pula hutan rakyat sebesar 31.707,44 Ha yang tersebar di 36 kecamatan. Hutan rakyat terluas berada pada Kecamatan Kalipucang yaitu sebesar 3.599 Ha.

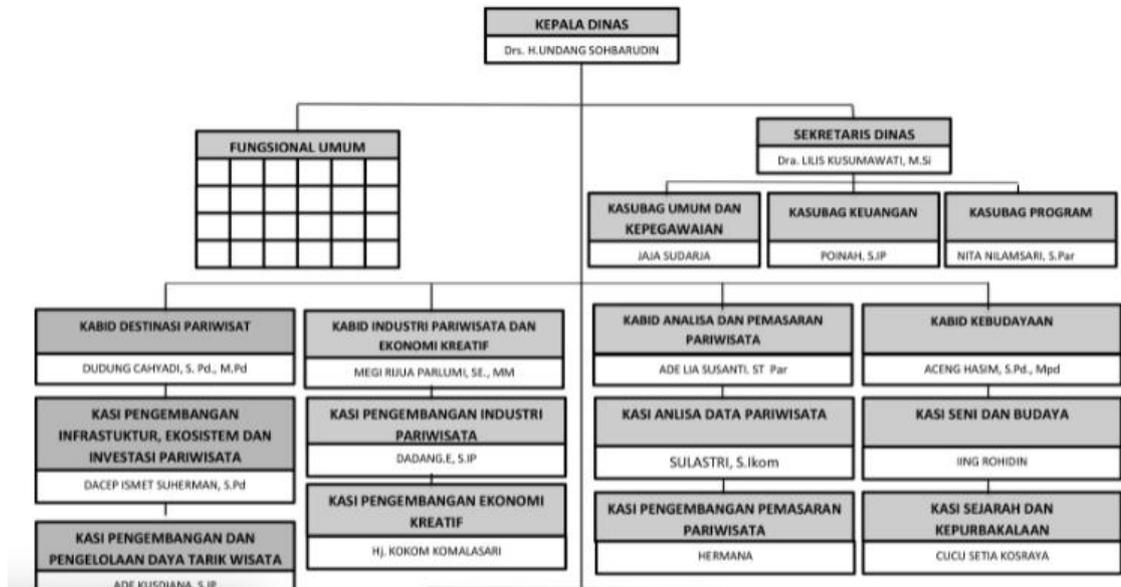
4.1.3. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran diatur dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014, yang meliputi: Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari : Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; dan Dinas Daerah, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi; 4. Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM; 5. Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6. Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan; 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari: 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja Lembaga Lain yaitu Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Setelah pangandaran memisahkan diri dari kabupaten Ciamis, bisa dilihat perbedaan yang sangat fantastik yaitu dari penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Keagamaan, Fisik, Penataan Wisata, Hotel, Restoran, Budaya dan lain-lainnya. Pangandaran merupakan kota wisata yang harus dipertahankan dalam kualitas dari berbagai macam jenis, untuk memberikan daya tarik bagi wisatawan juga investor baik dari dalam kota maupun luar kota bahkan dari luar negeri,

Untuk mewujudkan kota wisata diperlukan organisasi yang dominan untuk mendukungnya yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Sumber: Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran

Gambar 4.1.

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran

Adapun Visi Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran yaitu:

“Mewujudkan Pangandaran Sebagai Daerah Tujuan Wisata Dunia Yang Berbasis Lingkungan, Alam dan Budaya”

Sedangkan Misi-nya adalah: Meningkatkan kualitas aparatur dan sumber daya manusia Pariwisata dan Kebudayaan yang profesional;

1. Meningkatkan pengembangan kualitas aksesibilitas, amenitas dan atraksi wisata;
2. Mewujudkan sapta pesona dan promosi pariwisata;
3. Menjalin kemitraan dengan stakeholder pariwisata dan kebudayaan serta pelaku usaha;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

5. Meningkatkan penggalian, pelestarian, pemberdayaan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, kepurbakalaan dan seni budaya;
6. Menumbuhkembangkan potensi seni budaya sebagai peluang investasi wisata.

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Sampai dengan Tahun 2017, jumlah pegawai yang ada di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran seluruhnya adalah sebanyak 30 (tiga puluh) PNS dan 156 (seratus lima puluh enam) Tenaga Non PNS.

4.1.4. Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran siap melayani masyarakat dan melaksanakan kebijakan pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait kebudayaan dan pariwisata yang ada di Kabupaten Pangandaran. Potensi kebudayaan

dan pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran sendiri menjadi beberapa jenis yaitu: Wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Goa, Wisata Tirta dan Wisata Rekreasi.

Destinasi wisata yang populer di Kabupaten Pangandaran yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran adalah

1. Pantai Pangandaran, terletak di Desa Pangandaran, Desa Pananjung, Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran dan Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih;
2. Pantai Karapyak, terletak di Desa Bagolo Kecamatan Kalipucang;
3. Pantai Batuhiu, terletak di Desa Ciliang Kecamatan Parigi;
4. Green Canyon, terletak di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang; dan
5. Pantai Batu Karas, terletak di Desa Batu Karas Kecamatan Cijulang.

Sedangkan untuk destinasi-destinasi wisata lainnya yang tak kalah indah dan menakjubkan antara lain: Pantai Madasari, Situ Cisamping, River Tubing Citumang, Wonder Hills Jojogan, Pepedan Hills, Desa Wisata Margacinta, Goa Sinjalawang, Curug Bojong, Pantai Karang Nini, Santirah, Goa Sutra Reregan, Goa Kaca dan Goa Donan.

4.2. Hasil Penelitian

Dalam penelitian “Penyelenggaraan Dynamic Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran”, dynamic governance dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Neo dan Chen (2007:13) sebagaimana dalam Kerangka Pemikiran (Gambar 2.1) meliputi: 1) Culture; Institutiona culture; 2) Capabilities (thinking ahead, thinking again, dan thinking across; dan 3) Chgane: adaptive policy dikaitkan dengan pandemi covid 19 dan diharapkan dapat terwujud visi dan misi Kabupaten Pangandaran.

4.21. Penyelenggaraan *Dynamic Governance* Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran.

Dynamic governance sebagai bekerjanya berbagai kebijakan, institusi dan struktur yang telah dipilih sehingga dapat beradaptasi dengan ketidakmenentuan dan perubahan lingkungan yang cepat dan tetap relevan dan efektif dalam pencapaian keinginan jangka panjang masyarakat. Pandemi Covid-19 yang berdampak negatif terhadap berbagai aspek kesehatan, sosial dan ekonomi harus ditangani secara cepat dan tepat sehingga efektif. Untuk itu diperlukan pemerintahan yang dinamis selalu dapat melihat kebutuhan dari gejala-gejala pemerintahan.

Agar visi dan misi Kabupaten Pangandaran terwujud, maka penanganan pandemi covid 19 tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan tidak hanya di lingkungan instansi pemerintah, namun juga di tempat wisata termasuk pedagang dan masyarakat pengunjung.

4.2.1.1 Culture: Institutional Culture

Komponen culture (kultur) hadir sebagai fondasi dasar dalam proses dynamic governance. Kultur merupakan seperangkat nilai, kepercayaan, dan prinsip sebagai pegangan dalam kehidupan bermasyarakat. Warisan nilai kultur akan memengaruhi perilaku dan mencerminkan model mental masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kultur sesungguhnya merupakan produk keberhasilan di masa lalu yang kemudian ditanamkan dan menjadi acuan dalam berpikir dan selanjutnya menentukan arah dalam penyusunan strategi dan kebijakan.

Bagaimana kultur dapat menjadi rambu-rambu dalam penyelenggaraan pemerintahan? Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penyelenggaraan *Dynamic Governance* dalam penanganan

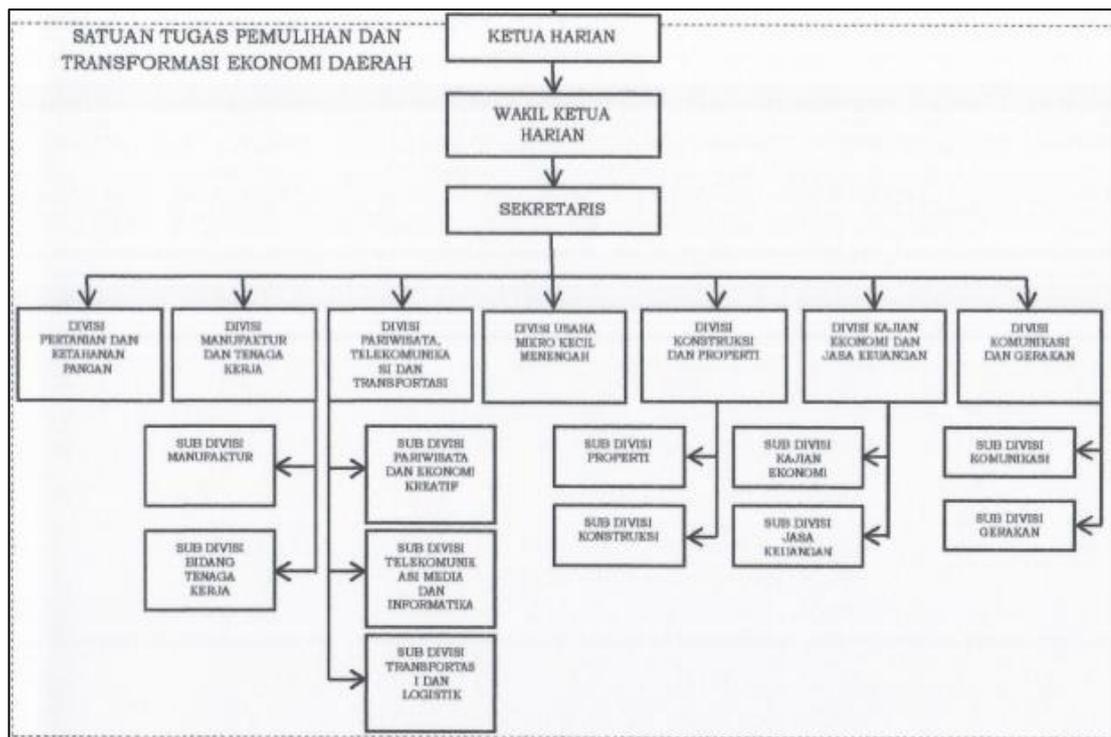
Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam penanganan pandemi covid 19, khususnya pada Kawasan Wisata dan masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

Tanggapan Asisten Perekonomian Kabupaten Pangandaran, bahwa dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Pangandaran telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Pangandaran dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.92-Huk/2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.101-Huk/2020 yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan Covid 19.

Dalam penanganan pandemi Covid 19 yang sampai saat ini belum mereda dari wilayah NKRI, maka apa saja tugas Komite Kebijakan Covid 19? Berikut jawaban Asisten Perekonomian Kabupaten Pangandaran:

Pertama, menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi, dan
Kedua, mengintegrasikan dan menetapkan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan strategis serta terobosan yang diperlukan untuk percepatan penanganan Covid 19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi.

Dalam penanganan pandemi Covid 19 khususnya di Kawasan Wisata di Kabupaten Pangandaran, dibentuk Komite Kebijakan Covid 19 yaitu Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah yang dibagi habis dalam 7 (tujuh) Divisi, yaitu: 1) Divisi Pertanian dan Ketahanan Pangan; 2) Divisi Manufaktur, Luar Negeri dan Tenaga Kerja; 3) Divisi Pariwisata, Telekomunikasi dan Transportasi; 4) Divisi Usaha Mikro Kecil Menengah; 5) Divisi Konstruksi dan Properti; 6) Divisi Kajian Ekonomi dan Jasa Keuangan; dan 7) Divisi Komunikasi dan Gerakan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Pemerintah Kabupaten Pangandaran 2021

Gambar 4.2.

Struktur Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah

Dari 7 (tujuh) divisi Komite Kebijakan Covid 19 yang terkait dengan kawasan pariwisata di Kab. Pangandaran tugas secara dominan dilaksanakan oleh Divisi Pariwisata, Telekomunikasi dan Transportasi bertugas untuk *Pertama*, merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang pariwisata; *Kedua*, merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi bidang industri media; dan *Ketiga*, merumuskan bahan kebijakan pemulihan dan transformasi ekonomi di bidang transportasi dan logistik.

Agar lebih spesifik tentunya Divisi Pariwisata dibantu beberapa Sub Divisi, antara lain Sub Divisi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang bertugas untuk *Pertama*, merancang pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif wilayah; *Kedua*, membangun kemitraan multipihak di bidang

pariwisata; *Ketiga*, merancang pengembangan ekonomi kreatif yang berdaya saing berbasis keunggulan kompetitif; dan *Keempat*, membangun kemitraan multipihak di bidang ekonomi kreatif.

Berdasarkan penyajian data dan fakta di atas terlihat bahwa, Pemerintah Kab. Pangandaran dalam penanganan pandemi covid 19 diawali dengan penyusunan kebijakan, pembentukan organisasi/devisi agar pembagian tugas menjadi jelas khususnya pada Devisi Pariwisata. Dengan demikian lembaga pemerintah dapat menjadi dinamis melalui pemanfaatan landasan nilai dan keyakinan budaya yang bersinergi dengan kapabilitas organisasi yang kuat untuk menciptakan dynamic governance system yang memungkinkan perubahan yang terus-menerus.

4.2.1.2 Capabilities (Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across)

Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan dynamic governance adalah landasan nilai budaya (institutional culture) yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Tiga kapabilitas dinamis, yakni thinking ahead, thinking again, dan thinking across yang memfasilitasi kebijakan- kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan.

a). Thinking ahead,

Pemerintah Kabupaten Pangandaran mampu melihat jauh ke depan tantangan-tantangan yang akan timbul dalam rangka menyusun skenario kebijakan di bidang pariwisata terkait dengan penanganan pandemi Covid 19. Indonesia adalah sebuah

negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan. Wisata maupun olahraga air adalah salah satu dari sekian banyak alternative wisata maupun olahraga yang diminati banyak orang, salah satunya adalah wisata air di Kabupaten Pangandaran.

Pantai Pangandaran merupakan andalan wisata destinasi Jawa Barat yang mempunyai wisata air bukan hanya pantai tetapi alam pegunungan yang memberikan nuansa dengan daerah wisata lainnya. Para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, menjadikan pantai sebagai tempat untuk bermain, berwisata, bersenda gurau, berdagang, menawarkan pijat, olahraga di laut seperti surfing, diving, dan snorkling atau sekedar bersantai menikmati keindahan pemandangan yang ada.

Mengingat tempat wisata air di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa sangat banyak, ditunjang jumlah penduduknya yang padat (tentunya banyak dibutuhkan spot-spot wisata khususnya di pantai), dalam wawancara dengan Kepala Seksi Bapak Riko Agung, S.STP di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran menjelaskan bahwa bagaimana agar pengunjung merasa aman dan nyaman saat berkunjung dan menikmati pantai di Kabupaten Pangandaran.

“Kegiatan wisata tirta wisata bahari yang dilaksanakan pada kawasan perairan maupun pesisir pantai selatan khususnya pantai pangandaran, kerap kali menimbulkan kecelakaan yang menimpa wisatawan oleh karena itu di Pangandaran pada tahun 1995 dibentuk Balawista (badan penyelamat wisata tirta) dan pertama kalinya diklat tersebut dilaksanakan oleh Balawista Badung Bali serta kerjasama dengan Menparpostel dan Kementerian Tenaga kerja indonesia dan sudah dilakukan diklat lainnya menyesuaikan dengan situasi dan keadaan sekarang. Dalam pengamanan kegiatan wisata bahari sangat ditentukan oleh keandalan petugas penyelamat pantai dan pemerintah perlu merekrut petugas penyelamat pantai yang andal sehingga lebih sigap mengantisipasi kecelakaan wisatawan di pantai.”



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021

Gambar 4.3
Wawancara dengan Kepala Seksi di Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran

Kemudian beliau melanjutkan menjelaskan mengenai sarana dan prasarana pendukung untuk keamanan dan keselamatan para wisatawan yang menikmati pantai Pangandaran.

“Meskipun balawista di Kabupaten Pangandaran lebih baik dibandingkan dengan balawista kabupaten lain khususnya di Jawa Barat, namun untuk standar balawista hal ini masih dinilai kurang seperti misalnya belum ada kolam renang berstandar internasional yang biasa digunakan untuk latihan ataupun kejuaraan, belum tersedianya fasilitas kebugaran sebagai fasilitas pendukung kebugaran bagi petugas Balawista, serta kurang dalam hal peralatan yang mendukung kegiatan penyelamatan, serta belum ada Rumah Sakit besar sebagai pendukung untuk menangani setiap kecelakaan berat ataupun kecil.”

Perlu adanya sebuah perencanaan dan perancangan sebuah bangunan sebagai markas sekaligus pusat pelatihan balawista yang berskala nasional dan memiliki standar internasional. Pusat balawista tersebut memiliki fasilitas yang memadai dan memenuhi kebutuhan ruang yang diperlukan. Selain itu markas dan pusat pelatihan ini dapat menjadi tempat yang mampu menunjang pengembangan potensi yang ada pada balawista pangandaran saat ini maupun dimasa mendatang.

Balawista adalah Badan Penyelamat Wisata Tirta yang mempunyai tugas sebagai pengawas/pemantau dan penjagaan kepada para pengunjung/wisatawan yang melakukan kegiatan wisata bahari, melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan refresif (setelah kejadian) dengan pencarian korban yang tenggelam. serta memberikan informasi tentang daerah aman untuk berenang dan daerah dilarang berenang.

Semua anggota Balawista telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang penyelamatan di pantai dan 3 (tiga) anggota Balawista telah mendapatkan sertifikat Instruktur di Bali, dengan standar *ILS / Internasional Life Saving Australia*. dan satu orang sebagai asesor balawista nasional. Selain menekan angka kecelakaan di pantai dan sekitarnya dengan cara memberikan pengawasan, himbauan dan pertolongan terhadap para pengunjung/wisatawan, anggota Lifeguard Balawista dituntut pula untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pengunjung/wisatawan sehingga akan membantu pula dalam promosi wisata yang pada akhirnya tingkat kunjungan wisatawan ke *Pantai Pangandaran, Pantai Batuhiu, pantai karapyak/bagolo, Green Canyon* dan *Pantai Batukaras* akan terus meningkat. Hal ini terbukti semenjak berdirinya Balawista dari tahun ke tahun angka kecelakaan menurun, dan pengunjung/wisatawan untuk datang ke pantai Pangandaran semakin meningkat.

Kemudian dalam wawancara dengan Pak Hendra salah seorang petugas pengamanan mengenai peringatan kepada masyarakat pengunjung terkait penanganan pandemi covid 19 pada destinasi wisata khususnya di pantai Pangandaran, dijelaskan bahwa

Disepanjang pantai tempat berkumpulnya masyarakat pengunjung diberi peringatan berupa baliho yang berisi agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan yaitu selalu menggunakan masker dan jaga jarak “Ayo Disiplin Penerapan Protokol Kesehatan” seperti pada gambar berikut:



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021

Gambar 4.4
Baliho Sosialisasi Protokol Kesehatan Pandemi Covid-19

Selain peringatan kepada masyarakat di pantai Pangandaran terdapat juga kantor yang khusus yang menangani covid 19. Pemerintah Kabupaten Pangandaran membentuk Posko Satgas Penanganan covid 19 yang keberadaannya tidak jauh dari destinasi wisata pantai Pangandaran sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021

Gambar 4.5
Posko Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Covid-19 Kabupaten Pangandaran

Selain adanya Baliho sosialisasi protokol kesehatan Pandemi Covid-19, dan Kantor khusus yang menangani covid-19, juga dilakukan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengunjung pantai pada malam hari saat hari libur khususnya malam minggu dalam penanganan pandemi covid 19. Satgas (satuan tugas) covid 19 pada malam hari dilaksanakan oleh “Petugas Jaga Lembur” yang tugasnya memantau dan mengawasi masyarakat pengunjung agar mematuhi protokol kesehatan sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021

Gambar 4.6
Petugas Jaga Lembur

Petugas Jaga lembur berasal dari masyarakat yang dibentuk oleh desa atas arahan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap pengunjung lokasi wisata, selain itu petugas jaga lembur juga memberikan edukasi bagi masyarakat dan pengunjung di lokasi wisata oantai pangandaran mengenai penerapan protocol kesehatan.

b) Thinking again.

Kebijakan-kebijakan pariwisata Kabupaten Pangandaran yang sudah berjalan saat ini dilihat kembali kelayakannya terkait degan situasi dan kondisi saat ini yaitu

terkait penanganan pandemi Covid 19. Kebijakan-kebijakan terkait dengan pengamanan yang selama ini sudah dilakukan yang sifatnya rutin, namun terus-menerus dilakukan perbaikan demi keselamatan para wisatawan. Kebijakan tersebut dilakukan secara rutin, mengingat pandemi covid 19 mulai merambah bulan Maret 2020 di Indonesia, hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs. Adang Ismail, MM bahwa Kegiatan yang rutin dilaksanakan yang dituangkan dalam kebijakan Balawisata/ Lifeguard Pangandaran Periode 2019-2021, meliputi:

1. Mengadakan pengawasan sistematis terhadap para pengunjung/wisatawan pantai dan kegiatan pantai lainnya;
2. Memberikan penerangan dan informasi kepada para pengunjung/wisatawan mengenai lokasi laut yang aman untuk berenang, lokasi laut yang berarus, lokasi laut yang berbahaya dan tata tertib di pantai serta penempatan rambu-rambu/peringatan-peringatan lainnya di objek wisata Pangandaran dan sekitarnya;
3. Menjaga keselamatan pengunjung/wisatawan yang berenang di laut/pantai objek wisata Pangandaran dan sekitarnya;
4. Mengarahkan para pengunjung/wisatawan yang berenang di daerah berbahaya ke daerah aman untuk mendapat pengawasan khusus serta memberikan tanda-tanda/rambu-rambu dengan bendera yang berwarna merah dan kuning;
5. Memberikan pertolongan baik preventive atau kuratif terhadap para pengunjung/wisatawan yang mendapat kecelakaan di objek wisata Pangandaran dan sekitarnya;
6. Melakukan pertolongan kepada para pengunjung/wisatawan, nelayan dan masyarakat sekitar yang mendapat kecelakaan.
7. Melakukan ekstra penjagaan di malam hari apabila diperlukan terutama pada setiap musim liburan sekolah, liburan hari raya dan liburan lainnya.
8. Ikut serta dengan warga masyarakat terutama dalam pelayanan transportasi yaitu bagi masyarakat yang meninggal dalam hal mengantar jenazah ke tempat pemakaman khususnya bagi keluarga kurang mampu.
9. Melakukan latihan rutin berupa latihan renang di kolam maupun di laut dan latihan teknik pertolongan di pantai/laut dalam upaya menuju personil Lifeguard yang professional.
10. Bersama instansi terkait melakukan pelatihan khususnya di bidang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
11. Berupaya melakukan kerja sama dengan pihak Asuransi dalam hal memberikan jaminan jiwa dan jaminan hari tua bagi para pengurus dan anggota Balawista.
12. Pengiriman personil/anggota untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan dengan standar internasional di Bali.
13. Pengiriman personil/anggota untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

14. Ikut serta bersama-sama masyarakat dan Pemerintah baik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam upaya pengembangan wisata bahari / wisata tirta di wilayah Kabupaten Ciamis.
15. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan mulai dari tingkat dasar maupun professional guna peningkatan kualitas kerja.
16. Menyelenggarakan kegiatan out bond dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat promosi yang bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan Balawista baik kepada para pengunjung maupun kepada masyarakat luas sehingga masyarakat atau para wisatawan dalam melakukan aktifitas akan merasa aman dan nyaman.
17. Melakukan perekrutan dan penerimaan anggota baru untuk memenuhi wilayah kerja yang cukup luas dengan penempatan personil di Pantai Pangandaran, Pantai Batuhiu, Green Canyon dan Pantai Batukaras yang direncanakan penambahan personil dari anggota yang ada sementara sekarang berjumlah 30 Orang.
18. Menyelenggarakan penghijauan pantai, dengan cara menanam pohon yang tumbuh besar yang dapat menahan/menjaga erosi pantai.
19. Melakukan Pelatihan rutin dengan event – event / olah raga Pantai seperti, Beach Sprint, Beach Flags, Run– Swim – Run, Board Race bagi para Anggota Lifeguard setiap bulan antar Pos jaga.
20. Melakukan Pembinaan atau Pelatihan kepada siswa/siswi SMK Kelautan tentang ilmu – ilmu Penyelamatan / Lifeguard di pantai serta meng ikut serta kan mereka di kala ada Penjagaan Hari – hari besar Nasional ataupun libur sekolah.
21. Menyelenggarakan Pelatihan dan Pendidikan Tingkat Internasional dengan Instruktur dari Balawista Pangandaran, Balawista Badung Bali, dan Surf Life Saving Australia / ILS. yang di adakan setiap setahun sekali di Pangandaran.
22. Menyelenggarakan diklat lanjutan bronze medalion 2016 dan mengikuti kompetisi balawista di palabuhanratu pada bulan oktober 2016.
23. Memberikan diklat training kepada obyek wisata bahari yang berada di kabuapten pangandaran diantaranya: pantai karapyak, pantai pangandaran, pantai batuhiu, citumang, greencanyon, santirah, pantai madasari dll
24. Mengangkat anggota tambahan dari 30 orang menjadi sebanyak 50 orang bagi anggota lifeguard baik di pangandaran ataupun di luar pantai pangandaran
25. Latihan rutin setiap hari sabtu di pantai dan setiap hari senin di kolam renang pantai indah resort timur
26. Meningkatkan kerjasama dalam hal diklat dengan ISLA yang bermarkas di Pantai Huntington Beach USA
27. Bekerjasama dengan Kemenko bidang Kemaritiman Jakarta dan BMD Northcliffe Australia SLSA
28. Membangun kerjasama dengan Disparbud Propinsi Jawa Barat dengan membuat adanya Modul Balawista Jabar yang telah di realese pada tahun 2019 serta Pergub Jawa Barat tentang Balawista Jabar
29. Menyebarluaskan Program Diklat diberbagai Daerah dan Propinsi tahun 2019 seperti Jakarta/ Asesor, Pacitan, Garut, Morotai, Belitung dan Pangandaran
30. Hubungan baik lebih intens dengan Disparbud Propinsi, Kemenparekrav dan kemenko bid kemaritiman dan investasi serta para sponsor seperti BMD Nortcliffe dari Australia salah satunya
31. Fokus dengan Asosiasi Balawista Tahun 2020

32. Telah dibentuk Balawista Jawa Barat dan Progres PERGUB BALAWISTA JAWA BARAT Desember 2020.

Kemudian beliau juga melanjutkan bahwa

selain terdapat tiga puluh dua kegiatan rutin, juga terdapat kegiatan yang terkait langsung dengan penanganan pandemi covid 19., yaitu: ikut peduli dengan adanya pandemi Covid 19 tahun 2020, bersinergis mendukung program pemerintah daerah yaitu Disparbud Kab Pangandaran dengan giat penyemprotan disinfektan diberbagai obyek wisata, patroli pantai sewaktu tertentu, ikut membantu di pintu gate, melakukan himbauan sesuai instruksi surat tugas Kadisparbud Kab Pangandaran.

c) Thinking across.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran belajar dari pemerintah daerah lain dalam rangka menghasilkan kebijakan adaptif. Dengan kata lain kapabilitas *think across* adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi internal agar tujuan dapat tercapai lebih baik. Kiat atau strategi agar visi “Kabupaten Pangandaran Pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama” sebagaimana tercantum dalam dokumen BAPPEDA Kabupaten Pangandaran. Dalam wawancara dengan salah seorang kepala seksi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Sejak dilantik sebagai Bupati Pangandaran pada 26 Februari 2021, Bupati Jeje Wiradinata melakukan kunjungan kerja ke Solo Jawa Tengah. Kunjungan dilakukan sebagai studi banding dalam rangka meningkatkan UMKM pariwisata di Pangandaran. Salah satu agenda kunjungan kerjanya adalah melihat sejauh mana keberadaan pelaku UMKM di Surakarta. Selain melakukan kunjungan ke pelaku UMKM, Pemerintah Daerah dan DPRD Pangandaran juga melakukan kunjungan kerjanya ke Pemerintah Kota Surakarta.

Dalam rangka mendukung visi misi Kab. Pangandaran terkait dengan pariwisata “menjadi kabupaten pariwisata mendunia”, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pangandaran juga melakukan studi banding ke Bali, sebagaimana

diungkapkan oleh Riko Agung, S.STP salah satu Kepala Seksi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran bahwa

studi banding ke pulau Bali sengaja dilakukan untuk mempelajari tata cara pengelolaan pariwisata yang diterapkan Pemda Badung. Soalnya, Pemda Badung terbukti berhasil meraup pendapatan daerah dari sektor kepariwisataan. Bahkan mampu memberikan subsidi sebesar 10-15 persen ke daerah lain yang kurang mendapatkan pendapatan. Kami juga melihat bahwa memang masyarakat Bali sudah menjiwai dan memiliki kesadaran terhadap kepariwisataan. Mereka juga taat pada agama dan hukum adat. Kami berharap, nanti sepulang dari Bali, antara masyarakat dan Pemkab Pangandaran beriringan bersama-sama membangun Pangandaran.

Masih terkait dengan study banding ke Bali, selanjutnya H. Tatang dari Pemkab Pangandaran mengatakan:

Pertama kita akan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada pihak Kesbangpolimas Badung terkait keorganisasian pecalang yang rencananya akan dibentuk di Pangandaran sebagai penjaga pantai untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan para wisatawan yang berwisata ke Pangandaran supaya betah. Tidak hanya keorganisasiannya saja, juga ingin menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pecalang, termasuk managemennya juga ingin tau bagaimana dengan sistem penggajiannya bagi pecalang atau penjaga pantai.

Kemudian beliau melanjutkan bahwa

Adapun tujuan study banding tersebut untuk meningkatkan pariwisata di Pangandaran. “Mulai tahun 2017 ini kan, Pemda Pangandaran mulai melakukan penataan kawasan obyek wisata termasuk membuat mukanya Pangandaran atau ruang terbuka hijau sebagai salahsatu daya tarik para wisatawan, seraya dirinya mengatakan, kunjungan study banding ini berdasarkan program pemerintah daerah menuju wisata yang mendunia. Intinya kami ingin mendapatkan wawasan dalam aspek keamanan, kenyamanan, ketentraman dan kebersihan yang ada di Kab Badung Bali.

Berdasarkan hal tersebut di atas terlihat bahwa terdapatnya kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi internal agar tujuan dapat tercapai lebih baik dalam penanganan pandemic covid di Kabupaten Pangandaran.

4.2.1.3 Change: Adaptive policy

Adaptasi kebijakan (*policy adaptation*) bukan merupakan reaksi pasif terhadap tekanan yang datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yang lebih baik; kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai manifestasi dari dynamic governance (Neo & Chen, 2007, p. 13).

Agar kebijakan tersebut dapat menginfestasi dynamic governance, dibutuhkan peranan kepemimpinan transformasional yang mampu membuat pilihan strategis yang inovatif dalam rangka menciptakan kerangka governance yang dinamis agar bisa keluar dari permasalahan, dalam hal ini penanganan pandemi covid 19 dikaitkan dengan destinasi pariwisata di Kab. Pangandaran.

Kebijakan secara teknis terkait penanganan pandemi covid 19 sampai dengan Mei 2021 penyebarannya masih tinggi dan di lain pihak diperlukan peningkatan wisatawan pada destinasi pariwisata di Kab. Pangandaran. Meskipun pandemi covid 19 masih belum mereda bahkan meningkat penyebarannya, maka untuk melindungi para wisatawan yang berkunjung ke wisata, Pemkab Pangandaran mengeluarkan surat yang isinya menyusun fakta integritas kesanggupan mematuhi protokol kesehatan di seluruh destinasi wisata kabupaten pangandaran yang ditandatangani oleh 80 organisasi atau pengelola destinasi wisata yang diketahui Forkompinda yaitu 4 Camat, 4 Danramil dan 4 Kapolsek di lingkungan wilayah Kab. Pangandaran sebagaimana yang tertera dalam Surat Bupati Pangandaran Nomor 081/1500-BPBD/2021.

Latar belakang dibuka kembali destinasi wisata pantai di Pangandaran mulai 18 Mei 2021, walaupun pandemi covid 19 belum mereda. Latar belakang dibuka

kembali destinasi wisata, agar ada keseimbangan antara faktor kesehatan dan faktor perekonomian yaitu:

- 1) Dibentuk Tim Pengelolaan Destinasi Wisata di masa Pandemi covid 19;
- 2) Dibuat SOP penanganan pandemi covid 19;
- 3) Pembatasan pengunjung ke destinasi wisata sebagai berikut:
 - a) Pantai Pangandaran 20.000 orang per hari;
 - b) Pantai Batuhiu 2.000 orang per hari;
 - c) Pantai Karapyak 3.5000 orang per hari;
 - d) Pantai Batu Karas 4.000 orang per hari; dan
 - e) Green Canyon 1.000 orang per hari;
- 4) Apabila pengunjung (huruf a s.d huruf e) tersebut telah mencapai 75% akan disusun skenario penutupan sementara
- 5) Pelaksanaan pembukaan destinasi wisata diawasi oleh Tim dalam kendali dan perintah langsung Bupati Pangandaran.

Secara teknik penerapan isi dari fakta integritas dalam rangka penanganan pandemi covid 19 pada destinasi pariwisata di Kab. Pangandaran bahwa pelaku usaha pariwisata di seluruh destinasi wisata Kabupaten Pangandaran menyatakan janji dan komitmen mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan covid 19 di seluruh destinasi wisata Kab. Pangandaran, sebgai berikut:

- (a) Sanggup mematuhi protokol kesehatan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas);
- (b) Sanggup melaksanakan pengecekan suhu tubuh dan menyediakan sarana prasarana cuci tangan dan/atau handsanitizer untuk pengunjung/wisatawan;
- (c) Sanggup menerima tamu maksimal 50% dari kapasitas jumlah kamar atau kapasitas ruangan restoran atau café atau kapasitas perahu pesiar atau perahu

wisata, odong-odong, ATV, sepeda becak wisata, olahraga air atau *watersport*; dan

- (d) Sanggup tidak membuka jasa hiburan dan/atau jasa pelayanan karaoke, hiburan malam dan pijat SPA.

Agar pengelolaan destinasi wisata di masa pandemic covid-19 dapat dilaksanakan secara efektif, maka diperlukan Tim yang tangguh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk mengamankan destinasi wisata di masa pandemi covid 19, sebagaimana Bagan di bawah ini:



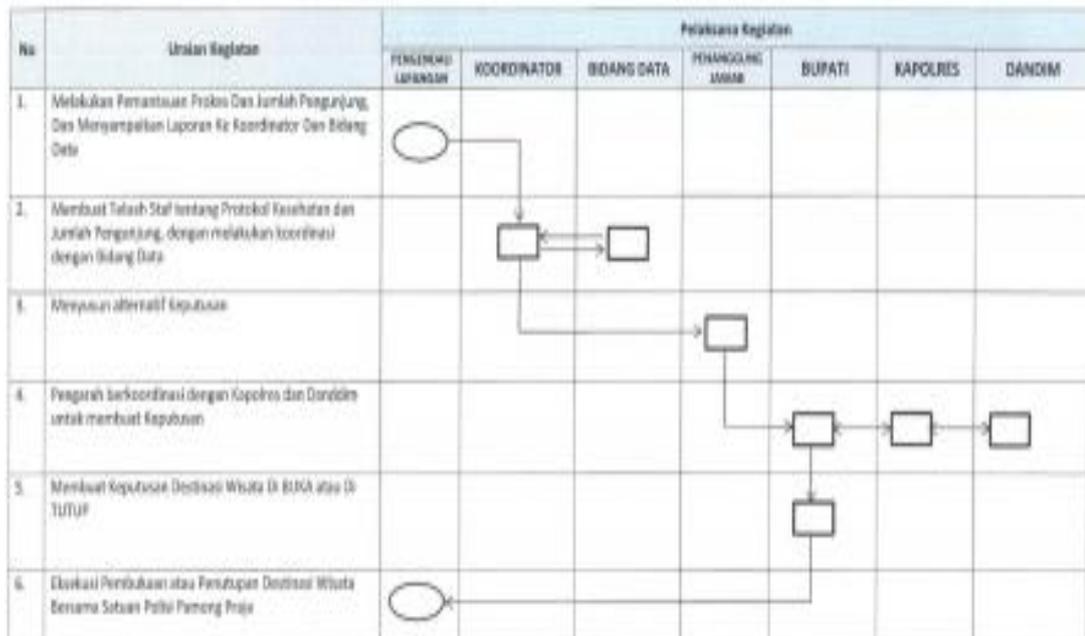
Sumber: Pemkab Pangandaran 2021

Gambar 4.7
Bagan Struktur Organisasi Pengelolaan Destinasi Wisata
Di Masa Pandemi Covid di Kabupaten Pangandaran

Dari struktur penanganan pandemi covid 19 tersebut, peranan kepemimpinan transformasional yang mampu membuat pilihan strategis yang inovatif dalam rangka menciptakan kerangka governance yang dinamis agar bisa efektif dalam mengelola pandemi covid 19 dikaitkan dengan destinasi pariwisata di Kab. Pangandaran sehingga akan terjadi keseimbangan antara sektor kesehatan dan sektor perekonomian.

Sebagai pimpinan dalam Forkumpinda Bupati sebagai pengarah didampingi Kapolres dan Dandim, sebagai penanggungjawab pengelolaan disini adalah Sekretaris Daerah, dan koordinator dipimpin oleh Asisten Daerah Bidang Administrasi Umum yang diperkuat Bidang Data (Kadis Pariwisata dan Kabag Perekonomian). Sedangkan Pengendali Lapangan Destinasi Wisata dipimpin oleh 4 (empat) Camat yang daerahnya sebagai destinasi wisata yaitu Kecamatan Kalipucang Pangandaran, Parigi dan Camat Cijulang.

Untuk memperlancar koordinasi antar Forkompinda dalam menangani kegiatan pandemi covid 19, Pemkab Pangandaran? berkoordinasi antar forkompinda dalam penanganan pandemi covid 19 diperlukan kebijakan berupa Standar Operasional Proedur (SOP) tujuannya agar antar kegiatan tidak saling tumpang tindih dan masing-masing kegiatan ada penanggungjawabnya. Adapun pelaksanaan kegiatan meliputi pengendali lapangan, koordinator, bidang data, pananggungjawab, Bupati, Kapolres, dan Dandim. Selengkapnya SOP dimaksud sebagaimana dalam gambar berikut:



Sumber: Pemkab Pangandaran 2021

Gambar 4.8
 Bagan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Destinasi Wisata di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan Gambar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Destinasi Wisata tersebut, kata kuncinya ada di pengendali lapangan, yaitu perlunya pemantauan protokol kesehatan yang berkunjung ke kawasan wisata. Untuk mengetahui kapasitas pengunjung di salah satu destinasi wisata (misalnya di Pantai Pangandaran jumlah masyarakat yang boleh berkunjung $75\% \times 20.000 \text{ orang} = 15.000 \text{ orang}$), sehingga diperlukan Bidang Data dan Koordinator, Pimpinan dalam hal ini Bupati yang memutuskan dan memerintahkan langsung ke Pengendali Lapangan apabila lebih dari 15.000 orang agar ditutup sementara, tentunya di lapangan perlu dibantu oleh Kapolres dan Dandim sambil menunggu pengunjung keluar dari Pantai Pangandaran.

Kemudian untuk melihat mengenai penerapan penanganan pandemi covid 19, apakah sampai akar rumput (masyarakat) yang paling bawah, Riko Agung, S.STP

salah satu Kepala Seksi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran menjelaskan bahwa

Penanganan pandemi covid 19 sampai kecamatan dan desa, untuk satuan tugas penanganan covid 19 tingkat kecamatan dibentuk satuan tugas penanganan covid 19 tingkat desa, kemudian kepala desa ditangani pembagiannya ada empat seksi, yaitu seksi komunikasi, seksi kesejahteraan sosial, seksi kesehatan dan seksi penegakan hukum dan pendisiplinan.

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs. Adang Ismail, MM mengenai pelibatan kepala wilayah dalam penanganan pandemi covid 19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, beliau menerangkan bahwa tugas camat selaku ketua penanganan pandemi covid 19 meliputi:

- 1) Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil satgas covid 19 kecamatan;
- 2) Menyusun rencana kegiatan penanganan covid 19 dengan mengacu pada satgas penanganan covid 19 daerah;
- 3) Mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan covid 19 desa;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis *pentahelix*;
- 5) Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan covid 19 serta hal-hal penting lainnya kepada satgas penanganan covid 19, dan
- 6) Melaporkan kepada satgas penanganan covid 19 daerah jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya. Sedangkan kepala desa menangani di tingkat desa.

Kemudian beliau melanjutkan mengenai langkah-langkah yang dilakukan agar masyarakat secara luas memahami dan dapat mengantisipasi adanya pandemi covid 19 di wilayah Kabupaten Pangandaran khususnya pada destinasi wisata, bahwa:

Dalam rangka pengendalian penyebaran covid 19 di seluruh destinasi wisata Kabupaten Pangandaran, dan berkenaan dengan pelaksanaan protokol kesehatan pandemi covid 19, ada beberapa hal yang perlu dimusyawarahkan bersama. Untuk itu Pak Sekda mengundang acara sosialisasi dan peningkatan peran atau pembagian tugas pada tanggal 17 Mei 2021 bertempat di Alun-alun Paamprokan yang diikuti oleh: 1) Para Staf Ahli Bupati; 2) Para Asisten; 3) Kepala Dinas Kesehatan; 4) Kepala Pelaksana BPBD; 5) Kepala Dinas Perhubungan; 6) Kepala Dinas Pariwisata (diikuti perwakilan pelaku pariwisata dengan jumlah maksimal 80 orang); 7) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 8) Camat Pangandaran; 9) Camat Sidamulih; 10) Camat Kalipucang; 11) Camat Parigi; 12) Kapolsek Pangandaran; 13) Kapolsek Sidamulih; 14) Kapolsek Kalipucang; 15) Kapolsek Parigi; 16) Danramil Pangandaran; 17) Danramil Parigi; 18) Danramil Kalipucang; 19) Danpos TNI AL Pangandaran; dan 20) Kasatpol Air Pangandaran.

Dengan adanya sosialisasi tugas dan peran tiap institusi tersebut pembukaan destinasi wisata dibuka secara perlahan dengan menerapkan protocol kesehatan. Pada masa pandemi covid 19 di Tahun 2020, masyarakat yang berkunjung ke destinasi wisata pantai pangandaran sesuai data dari Galih Avomegi, M.Si, Kasubag Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa ternyata walaupun pada situasi pandemi covid 19 di Tahun 2020, realisasi target kunjungan destinasi wisata pantai pangandaran dapat memenuhi target yang ditentukan pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
Target dan Realisasi Kunjungan Destinasi Wisata
Pantai Pangandaran Tahun 2021

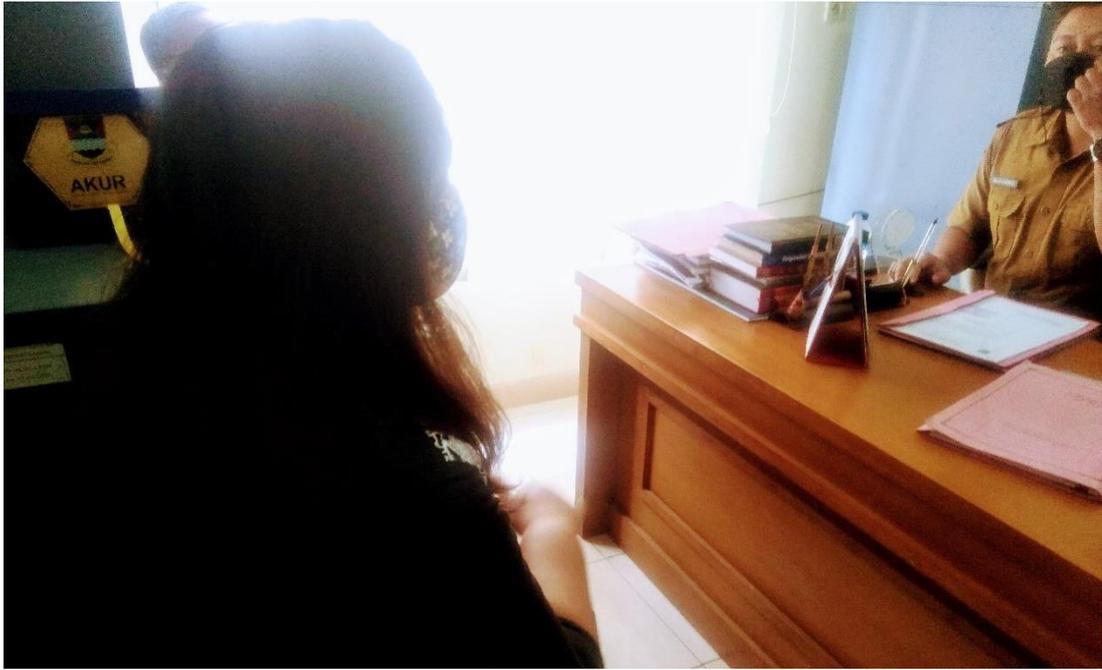
NO	OBJEK WISATA	TAHUN 2020 (Masa Pandemi Covid-19)					
		TARGET PERUBAHAN 2020	TARGET PENGUNJUNG	WISMAN	WISNUS	Jumlah Pengunjung	REALISASI
1	OW. Pangandaran	8.204.612.179	1.640.922	62	2.036.980	2.037.042	10.185.207.500
2	OW. Batu Hiu	426.021.102	85.204	6	109.107	109.113	545.563.750
3	OW. Green Canyon	269.183.451	53.837	155	64.075	64.230	321.150.000
4	OW. Batukaras	1.377.074.857	275.415	237	349.041	349.278	1.746.387.500
5	Ow. Karapyak	723.108.410	206.602	0	282.360	282.360	988.260.000
JUMLAH TOTAL		11.000.000.000	2.261.981	460	2.841.562	2.842.022	13.786.568.750

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan tabel tersebut, Kasubag Perekonomian Sekretariat Kabupaten Pangandaran, Bapak Galih Avomega, M.Si dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

memang terdapat peningkatan pengunjung pada obyek wisata di Kabupaten Pangandaran sebanyak 780.041 orang, dimana dari 2.261.198 pengunjung yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, terdapat 2.842.022 pengunjung yang datang. Namun sebagian besar terdiri dari pengunjung wisatawan lokal.

Kenaikan jumlah wisatawan local tersebut tentunya akan meningkatkan realisasi anggaran dari destinasi wisata dari Rp. 11 Milyar menjadi Rp. 13,786 Millyar. Realisasi anggaran tersebut melebihi sebesar 2,786 M dari target perubahan yang telah ditetapkan sebelumnya.



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021

Gambar 4.9
Wawancara dengan Kasubag Perekonomian Sekretariat
Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hal tersebut, adaptasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui kepemimpinan Bupati Pangandaran yang membuat pilihan strategis dengan tetap membuka obyek wisata dengan protocol kesehatan untuk memperlancar perekonomian di Kabupaten Pangandaran mendapatkan dukungan masyarakat.

4.2.2. Dukungan *Stakeholder* Dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Dukungan *Stakeholder* Kabupaten Pangandaran terlihat dari 3 unsur pemangku kepentingan pada pemerintahan daerah yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Dalam penelitian ini dapat terlihat dari sikap dan perilaku petugas dalam melaksanakan kebijakan penanganan pandemic covid-19, sikap dan perilaku pihak swasta dalam hal ini pemilik warung, hotel dan tempat usaha dalam mendukung

kebijakan penanganan pandemic covid-19, serta sikap dan perilaku masyarakat setempat dan pengunjung dalam melaksanakan kebijakan penanganan pandemic covid-19.

Sikap dan perilaku petugas mendukung kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaan penanganan pandemic covid-19. Penerapan kebijakan yang dilakukan para petugas di lapangan terkait penanganan pandemi covid 19 pada destinasi wisata di Pangandaran dapat terlihat dari Petugas di lingkungan penanganan pandemi covid 19 di Pantai Pangandaran terdiri dari Petugas Jaga Lembur, Satpol PP, dan Kepolisian.



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021

Gambar 4.10
Wawancara dengan Petugas Pengamanan Pangandaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petugas pengamanan di Pantai Pangandaran, Pak Hendra bahwa:

Petugas Jaga Lembur menertibkan masyarakat pengunjung di waktu siang hari berseragam coklat muda, sedangkan waktu malam hari berseragam putih.

Tugas pokok petugas jaga lembur untuk menertibkan di lingkungan pantai, antara lain untuk mengingatkan kepada para pedagang, perparkiran agar tertib, termasuk mengingatkan masyarakat agar menjaga protokol kesehatan (pemakaian masker).

Apabila ada pedagang yang berjualan atau motor diparkir tidak pada tempatnya, maka petugas akan memperingatkan dan mengambil gambar (difoto) dan dishare ke Satpol PP.

Ketika dikonfirmasi mengenai apakah selain Satpol PP apakah ada petugas lain yang membantu di lapangan untuk penanganan pandemi covid 19?, beliau menjelaskan bahwa:

Petugas Jaga Lembur membantu Satpol PP, perekrutan petugas Jaga Lembur berasal dari Kabupaten Pangandaran atas ide dari bupati, mengingat para pedagang yang “membandel” berdagang di areal pantai juga berasal dari wilayah pangandaran, sehingga penertiban terkait dengan protokol kesehatan akan lebih mudah mengingat budaya dan bahasanya relatif sama.

Lebih lanjut beliau menjelaskan pembagian tugas keamanan di lapangan pada pagi, siang, sore dan malam (pantai pangandaran timur dan pantai pangandaran barat) dalam pengamanan penanganan pandemi covid 19 sebagai berikut:

Petugas Jaga Lembur dan Satpol PP dipagi hari juga sudah menutup sebagian jalan yang menuju Pantai Timur agar tidak terjadi lalu lalang kendaraan bermotor ke Pantai Barat dengan bangku sehingga mengurangi pergerakan masyarakat agar tidak terjadi penumpukan masyarakat, khususnya pada hari libur Sabtu dan Minggu.

Di malam hari ada petugas kepolisian juga berjaga-jaga di jalan masuk jalan menuju ke pantai timur. Dan apabila terjadi penumpukan masyarakat di pantai barat maupun pintu timur, maka kendaraan diputar balik sementara sambil menunggu masyarakat keluar (khususnya saat jam-jam chek out hotel), hal ini dilakukan pada hari Sabtu 22 Mei 2021 dari Jam 12.00 sampai dan Jam 15.00), setelah agak lengang kendaraan pengunjung diperbolehkan masuk ke pantai.

Hal senada dengan Pak Hendra, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs. Adang Ismail, MM menjelaskan penjadwalan patroli gabungan yang melaksanakan tugasnya di pantai pangandaran timur dan pantai pangandaran barat dalam menegakan protokol kesehatan khususnya bagi masyarakat pengunjung di pantai, bahwa:

Saat masyarakat pengunjung makin banyak di pantai barat, patroli dari satgas maupun patrol dari Polres Ciamis juga melintas di jalan tepi pantai barat. Demikian juga petugas yang ada di 5 (lima) pos penanganan pantai juga mengingatkan masyarakat lewat pengeras suara pentingnya penggunaan masker dan jaga jarak (protokol kesehatan), walaupun petugas penanganan pantai tugas pokoknya menangani apabila terjadi kecelakaan saat berwenang di pantai.

Lebih lanjut Drs. Adang Ismail, MM menjelaskan sikap dan perilaku para pedagang, baik yang menempati kios, maupun tidak menempati kios terhadap protokol kesehatan (khususnya pemakaian masker) di tengah-tengah masyarakat pengunjung pantai pangandaran, bahwa

Pedagang menempati kios-kios pada umumnya dengan menjual baju kaos dengan bergambar atau bercorak “pantai pangandaran” baik untuk dewasa maupun anak-anak. Pedagang kios juga menjual hasil perikanan (jambal roti, udang dan ikan), sedangkan penjual hasil bumi (pisang, sirsak, sawo, petai, gula) dengan menggelar dagangan di depan hotel biasanya berjualan sebelum tamu-tamu hotel chek out.

Pedagang pada umumnya menyiapkan masker, namun tidak digunakan, penggunaan masker apabila ada pembeli barang dagangannya.

Omset penjualan para pedagang dimaksud mengalami penurunan penjualan jika dibandingkan sebelum munculnya pandemi covid-19.

Sementara sikap dan perilaku masyarakat yang berkunjung ke pantai pangandaran saat pandemi covid 19 masih belum bisa diatasi. Masyarakat pengunjung sebagian besar bermasker, masyarakat umumnya menikmati suasana pantai sambil berfoto bersama keluarga sebagian menggunakan masker dan sebagian lainnya menggunakan masker tetapi tidak menutupi hidung dan ada juga yang tidak bermasker, hal ini berpandangan bahwa sama-sama anggota keluarga, sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021

Gambar 4.11
Suasana Pengunjung di Lokasi Wisata Pantai Pangandaran

Penduduk di Lokasi Wisata Pangandaran pernah disosialisasikan pencegahan pandemi Covid 19 saat awal terjadinya wabah tahun 2020 selain dari itu petugas juga menyemprotkan disinfektan ke rumah-rumah warga, dan saat ini masih dibagikan masker per kepala keluarga per minggu. Kemudian, manajemen hotel melaksanakan protokol kesehatan, misalnya di pintu lift diberi peringatan agar menggunakan masker. Begitu juga para petugas front office, serta petugas cleaning service menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dengan benar. Namun saat sarapan pagi terjadi penumpukan tamu-tamu hotel saat mengantri mengambil hidangan (seharusnya ada petugas yang mengatur dan mengingatkan tamu-tamu untuk menjaga jarak antrian).

Setelah libur panjang bulan Juni 2021, Kawasan wisata pantai Pangandaran dapat dibuka kembali. Hal itu dilakukan karena Kabupaten Pangandaran per Rabu 24 Juni 2021, masuk sebagai daerah dengan kategori zona oranye di Jawa Barat. Sesuai

arahan aturan PPKM Pemerintah Pusat, daerah dengan wilayah status zona oranye dapat dipersilakan untuk membuka tempat wisata demi mempercepat pemulihan ekonomi nasional. walaupun sudah dibuka, protokol kesehatan pandemi covid-19 tetap ketat diterapkan demi keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangandaran.

Strategi atau siasat yang dipergunakan petugas satgas covid agar masyarakat pengunjung taat pada protokol kesehatan pada destinasi wisata Pangandaran yaitu dengan secara ketat mengatur jumlah pengunjung yang berada di kawasan wisata, khususnya di tempat wisata pantai. Petugas gabungan Satpol PP, TNI dan Polri juga secara reguler melakukan patroli di sepanjang garis pantai wisata di Pangandaran. Kelompok khusus penyelamatan juga disiagakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat wisata pantai.

Selain itu Polsek Pangandaran juga memberi edukasi pencegahan covid 19 bagi wisatawan Pantai Pangandaran sejak dibuka kembali karena masuk zona orange terkait pandemi covid 19 di Pantai Pangandaran. Kepolisian Sektor Pangandaran Polres Ciamis Polda Jabar melaksanakan kegiatan edukasi pencegahan Covid-19 berupa himbauan pendisiplinan Protokol Kesehatan terhadap wisatawan di kawasan obyek wisata Pantai Pangandaran sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dokumentasi Penelitian 2021

Gambar 4.12
Himbauan Pendisiplinan Protokol Kesehatan Terhadap Wisatawan di Kawasan
Obyek Wisata Pantai Pangandaran

Pendisiplinan protokol kesehatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat agar terhindar dari paparan virus corona. Masyarakat khususnya wisatawan dapat merasa nyaman saat beraktifitas menikmati akhir pekan di Pantai Barat Pangandaran. Selama penyampaian himbauan protokol kesehatan, anggota mengajak wisatawan untuk selalu menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan.

Bila jumlah kasus melonjak naik dan makan banyak warga yang terpapar covid, maka seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat akan ditutup sementara selama 10 hari ke depan. Keputusan itu akan diambil melalui hasil Rapat Seluruh Forkopimda Kabupaten Pangandaran. Aktivitas pasar, restoran dan kegiatan masyarakat akan diimbau tutup termasuk resepsi, pengajian dan kegiatan lain yang mengundang kerumunan akan dilarang. Selain menghentikan aktivitas

pariwisata, Pemkab Pangandaran juga dapat diberlakukan work from home (WFH) 100 persen untuk semua perkantoran pemerintah.

Tabel 4. 4
Data Zona Resiko Covid Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat

The screenshot shows a dashboard for 'Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Provinsi Jawa Barat'. It includes navigation links like 'Home', 'Data', 'Vaksinasi', 'Isoman', 'Terapi Oksigen', 'Donasi', and 'Informasi'. There are filter buttons for 'Terkonfirmasi', 'Suspek', 'Kontak Erat', and 'Probable'. The main table displays COVID-19 statistics for July 13, 2021, and the previous 7 days (H-7) across various regencies.

Nama Kota/Kabupaten	Terkonfirmasi			Isolasi/ Dalam Perawatan			Selesai Isolasi/ Sembuh			Meninggal		
	13 Juli 2021	H-7	Total	13 Juli 2021	H-7	Total	13 Juli 2021	H-7	Total	13 Juli 2021	H-7	Total
TOTAL KESELURUHAN	7.192	57.765	467.141	3.261	25.342	95.942	3.841	31.314	364.493	90	1.109	6.706
KAB. PURWAKARTA	0	91	6.019	-22	-55	191	22	141	5.666	0	5	162
KAB. KARAWANG	602	5.554	34.062	161	867	5.889	409	4.332	26.898	32	355	1.275
KAB. BEKASI	523	4.044	35.510	330	515	4.787	193	3.523	30.655	0	6	68
KAB. BANDUNG BARAT	122	1.121	12.412	-11	-75	1.420	131	1.179	10.829	2	17	
KAB. PANGANDARAN	0	307	3.398	-40	81	307	38	209	3.028	2	17	

Sumber: Data satgas penanganan covid Kabupaten Pangandaran, 2021

Berdasarkan data-data penanganan pandemi covid 19, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih lebih baik di Jawa Barat, hal ini menunjukkan penanganan pandemi covid 19 Kabupaten Pangandaran jika dibandingkan kabupaten lain wilayah Jawa Barat, menunjukkan bahwa dalam organisasi pemerintahan Kabupaten Pangandaran memiliki kemampuan dalam melakukan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Kemampuan ini muncul karena terdapat sebuah proses yang selalu responsive untuk menjawab tantangan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan-kebijakan inilah yang disebut sebagai *adaptive policy* sebagai tujuan utama dari sebuah tata kelola pemerintahan yang memiliki *dynamic governance* yang pada akhirnya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berdasarkan norma agama.

4.3. Pembahasan

Dynamic governance merupakan sebuah konsep yang menekankan bagaimana bekerjanya berbagai kebijakan pemerintahan, institusi, dan struktur yang telah disusun sedemikian rupa agar mampu dan bisa beradaptasi dengan cepat pada suatu kondisi ketidakpastian dan perubahan sehingga dapat tetap relevan dan efektif untuk mencapai tujuan. Pertanyaannya sebagai mana yang telah diungkapkan pada sebelumnya, apakah mungkin Pemerintah bisa dinamis? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan pada intinya mengungkap kontradiksi makna *dynamic governance* itu sendiri (*oxymoron*). Gambaran tentang Pemerintah pada umumnya sangat jauh dari perspektif dinamis. Sebaliknya, Pemerintah –khususnya birokrasi pemerintah– seringkali dipahami sebagai entitas yang lambat, birokrasi yang ketinggalan jaman, kaku dan tidak memiliki perhatian baik terhadap kepentingan dan kebutuhan individu maupun bisnis (Neo & Chen, 2007, p. 1).

Berdasarkan Penyajian Data pada Sub Bab 4.3. tersebut, berikut ini disajikan pembahasan penelitian “Penyelenggaraan Dynamic Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran”, *dynamic governance* dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Neo dan Chen (2007:13) sebagaimana dalam Kerangka Pemikiran (Gambar 2.1) meliputi: 1) *Culture; Institutional culture*; 2) *Capabilities (thinking ahead, thinking again, dan thinking across*; dan 3) *Change: adaptive policy* dikaitkan dengan pandemi covid 19 dan diharapkan dapat terwujud visi dan misi Kabupaten Pangandaran.

Warisan nilai kultur akan memengaruhi perilaku dan mencerminkan model mental masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan kultur merupakan produk keberhasilan yang dapat menentukan arah dalam penyusunan strategi dan kebijakan. Hal ini telah dilaksanakan oleh Bupati di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pangandaran, strategi dan kebijakannya diimplementasikan demi terwujudnya visi dan misi.

Adapun langkah awal menyusun dan menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Pangandaran dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.92-Huk/2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor: 443/Kpts.101-Huk/2020 yang selanjutnya disebut Komite Kebijakan Covid 19.

Dari kebijakan tersebut disusun strategi, yaitu: *Pertama*, menyusun kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi; *Kedua*, mengintegrasikan dan menetapkan langkah kebijakan strategis serta terobosan percepatan penanganan covid 19 dan pemulihan perekonomian.

Divisi Pariwisata dibantu beberapa Sub Divisi tentunya mempunyai tugas paling dominan untuk meningkatkan destinasi wisata namun juga harus berkoordinasi dengan divisi atau lembaga pemerintah lainnya dalam menangani pandemi covid-19. Dengan demikian lembaga pemerintah dapat menjadi dinamis melalui pemanfaatan landasan nilai dan keyakinan budaya yang bersinergi dengan kapabilitas organisasi yang kuat untuk menciptakan dynamic governance system yang memungkinkan perubahan yang terus-menerus.

Tiga kapabilitas dinamis, yakni thinking ahead, thinking again, dan thinking across yang memfasilitasi kebijakan- kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memikirkan untuk masa depan (*thinking ahead*), yaitu:

- 7) mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan demi terwujudnya visi dan misi khususnya dimasa pandemi covid 19;
- 8) memahami bagaimana perkembangan akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini dengan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program;
- 9) menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksploitasi peluang baru; dan
- 10) mempengaruhi pengambil keputusan utama (berupa keputusan bupati) dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul terkait penanganan pandemi covid 19 dan melibatkan instansi pemerintah di bawahnya serta perwakilan masyarakat tentang respon yang akan dilakukan.

Kebijakan-kebijakan pariwisata Kabupaten Pangandaran yang berlaku saat ini ditinjau kembali kelayakannya terkait dengan situasi dan kondisi saat ini yaitu terkait penanganan pandemi Covid 19 yang berdampak pada sektor kesehatan, ekonomi dan sektor-sektor lain. Kebijakan-kebijakan terkait dengan pengamanan yang selama ini sudah dilakukan yang sifatnya rutin, namun terus-menerus dilakukan perbaikan demi keselamatan para wisatawan dan penduduk/masyarakat di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Dengan demikian dari pengalaman Pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan cara berfikir (*thinking again*), yaitu terus memikirkan kembali proses dan kebijakan yang sedang dijalankan khususnya pada destinasi wisata agar senantiasa sesuai dengan visi dan misi dikaitkan dengan penanganan pandemi covid 19.

Kapabilitas *think across* adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi internal agar tujuan dapat tercapai lebih baik.

Mulai tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Pangandaran mulai melakukan penataan kawasan obyek wisata termasuk membuat mukanya Pangandaran atau ruang terbuka hijau sebagai salah satu daya tarik para wisatawan, kunjungan study banding ini berdasarkan program pemerintah daerah menuju wisata yang mendunia. Intinya kami ingin mendapatkan wawasan dalam aspek keamanan, kenyamanan, ketentraman dan kebersihan yang ada di Kab Badung Bali.

Dengan demikian tiga kapabilitas dinamis, yakni *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* yang memfasilitasi kebijakan- kebijakan adaptif yang tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah Kabupaten Pangandaran terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan dalam penanganan pandemi covid 19 pada kawasan wisata Kabupaten Pangandaran. Dengan kata lain lembaga atau organisasi perangkat daerah yang terbagi dalam 7 (tujuh) divisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran melaksanakan isi dari kebijakan berupa Keputusan Bupati Pangandaran tentang Komite Kebijakan Covid 19 yang telah mengintegrasikan dan menetapkan langkah kebijakan strategis serta terobosan percepatan penanganan covid 19 dan pemulihan perekonomian.

Adaptasi kebijakan (*policy adaptation*) merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yang lebih baik; kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai manifestasi dari *dynamic governance*.

Untuk itu dibutuhkan peranan kepemimpinan transformasional yang mampu membuat pilihan strategis yang inovatif dalam rangka menciptakan kerangka *governance* yang dinamis agar bisa keluar dari permasalahan, dalam hal ini penanganan pandemi covid 19 dikaitkan dengan destinasi pariwisata di Kab. Pangandaran.

Alur perubahan yang terjadi dalam penanganan pandemi covid 19 pada kawasan wisata Kabupaten Pangandaran dicirikan oleh terdapatnya para *able people* di dalam organisasi pemerintah daerah khususnya tujuh divisi yang memiliki kemampuan dalam melakukan *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across*. Kemampuan ini muncul karena terdapat sebuah proses dalam organisasi pemerintah yang selalu responsif untuk menjawab tantangan yang terjadi di masyarakat (*agile process*).

Kedua hal inilah yang pada akhirnya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan pemagku kepentingan dan secara terus-menerus diperbarui untuk menyesuaikan tantangan dalam penangan pandemi covid 19 yang berdampak khususnya pada sektor kesehatan dan sektor perekonomian pada umumnya. Kebijakan-kebijakan inilah yang disebut sebagai *adaptive policy* sebagai tujuan terwujudnya visi misi Kabupaten Pangandaran yang memiliki *dynamic governance*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data pada bagian-bagian terdahulu dalam penelitian ini, maka penelitian kelompok dengan judul “Penyelenggaraan Dynamic Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran” dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan *Dynamic Governance* dalam penanganan pandemi Covid-19 Di Kawasan Wisata Kabupaten Pangandaran berjalan dengan baik. Ketiga dimensi *dynamic governance* yaitu 1) *Culture* 2) *Capabilities* dan 3) *Change* menunjukkan adanya gambaran positif pada setiap dimensi. Pemerintah Kabupaten Pangandaran memikirkan untuk masa depan, memahami bagaimana perkembangan dengan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program destinasi wisata dimasa pandemi covid 19, menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman, dan mempengaruhi pengambil keputusan utama (berupa keputusan bupati) serta pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul terkait penanganan pandemi covid 19.
2. Dukungan stakeholder/pemangku kepentingan dalam hal ini instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat/pengunjung terdeskripsikan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa orang yang abai melaksanakan protocol kesehatan. Namun Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak berhenti untuk mensosialisasikan gaya hidup tatanan baru dengan protocol kesehatan.

Kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan dengan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan covid 19 pada petugas, pelaku usaha dan masyarakat, sehingga diharapkan pandemi covid 19 dapat melandai dan bahkan segera berakhir.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka disarankan kepada pihak yang terlibat dalam dynamic governance untuk

1. Agar penerapan dynamic governance sebagai upaya untuk merekonstruksi tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangandaran sesuai dengan keunikan dan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penanganan pandemi covid 19 dan kawasan wisata terus menerus melakukan thinking ahead untuk mewujudkan kepemimpinan transformatif sebagai kunci perubahan sampai pada pentingnya mereformasi sistem. Perlu mengkaji ulang dengan melakukan thinking again atas kebijakan-kebijakan yang selama ini telah dianggap baik pengelolaan destinasi wisata pangandaran dalam penanganan pandemi covid 19, diantaranya adalah kebijakan terhadap perlindungan pelaku usaha dan masyarakat, dan pentingnya membangun kembali sistem administrasi publik.
2. Agar meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran, mengingat koordinasi yang lemah antar organisasi perangkat daerah atau divisi dalam penanganan pandemi covid 19 yang tidak hanya menghabiskan anggaran tetapi memperlambat pengambilan keputusan, untuk itu digagas melakukan thinking across secara efektif, salah satu bentuknya melakukan penyelarasan kebijakan dan perangkat peraturan. Menggali kembali nilai-nilai luhur tentang kejujuran, etika dan norma, serta nilai-nilai kearifan lokal,

yang ada di tengah-tengah masyarakat pangandaran sebagai pendorong terwujudnya dynamic governance. Dengan menerapkan berbagai hal tersebut di atas, diharapkan dapat terwujud Kabupaten Pangandaran pada tahun 2025 menjadi kabupaten pariwisata yang mendunia, tempat tinggal yang aman dan nyaman berlandaskan norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andhika, Lesmana Rian, 2017, Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government, *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol 8 no 2, 2017/12/31, 87-102, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/867>
- Budiati, Ayuning, 2019, Kesiapan Pelaksanaan “Dynamic Governance” Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kantor Layanan Operasional Kabupaten Lebak Provinsi Banten, *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, Vol 3, No 2 (2019), <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS/article/view/7550>
- Buheji, M., & Ahmed, D. (2020). Planning Competency in the New Normal-Employability Competency in Post-COVID-19 Pandemic. *Business Management and Strategy*, 160-179.
- Fadli, Ari, 2020, Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan "Peduli Lindungi" Aplikasi Berbasis Andorid. Available from: https://www.researchgate.net/publication/340790225_MENGENAL_COVID_19_DAN_CEGAH_PENYEBARANNYA_DENGAN_PEDULI_LINDUNGI_APLIKASI_BERBASIS_ANDORID [accessed Dec 14 2020].
- Hertanto, 2017, Tata Kelola Pemerintahan Daerah Otonom Baru pada Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 1, April 2017, pp. 65-79, Available from: https://www.researchgate.net/publication/324821294_Tata_Kelola_Pemerintahan_Daerah_Otonom_Baru_pada_Kabupaten_Pesisir_Barat_Provinsi_Lampung [accessed Dec 14 2020].
- Istianto, J. Hendra dan Tyra, M. Josephine. 2011. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan pada Rumah makan KETTY RESTO. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*. Volume 1, Nomor 3, September 2011
- Kusuma, Bayu M.A, 2015, Urgensi Dynamic Governance Dalam Meningkatkan Profesionalisme Manajemen Penyelenggaraan Haji, Dakwah Annual Conference yang diselenggarakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 7 November 2015)
- Marpaung, Enrico WBH, 2020, COVID-19 dan New Normal (Sudut Pandang Sosiologis). Available from; https://www.researchgate.net/publication/342120384_COVID-19_dan_New_Normal_Sudut_Pandang_Sosiologis. Diakses pada 14 Desember 2020

- Maslikun dkk, 2018, Tatakelola Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Malalayang Kota Manado, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4, No 54 (2018) <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/19247/18798>
- Mazidah, Alifatu Lela, dkk 2019, Analisis Dynamic Governance Pada Program Layanan Layad Rawat Di Dinas Kesehatan Kota Bandung, *Spirit Publik* Volume 14, Nomor 2, 2019 Halaman 154-163, <https://jurnal.uns.ac.id/spiritpublik/article/view/39290/25902>
- Mudiyati Rahmatunnisa, 2019, Dialektika Konsep Dynamic Governance, *Jurnal Academia Praja*, Vol 2 No 02, <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/116>
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: embedding culture, capabilities and change in Singapore*. New Jersey: World Scientific
- Nugroho, Riant, 2018, *Kebijakan Pariwisata Sebuah Pengantar untuk Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Riawan, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Setiawan, irfan, 2020, *Kecamatan di Wilayah Perbatasan Negara*, RTujuh Mediaprinting, Bandung
- Setiawan, Irfan, 2018, *Handbook Pemerintahan Daerah*, Wahana Resolusi, Yogyakarta
- Suradinata, Ermaya. 1998. *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan dalam Era Globalisasi*, Ramadan, Bandung.
- Swarbrooke, John, 1998, *Sustainable Tourism Management*, Wallingford: CABI Publishing.
- Syafri, Wirman dan Alwi. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*. Jatinangor: IPDN Press
- Syafiie, Inu Kencana, 2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- World Health Organization. *Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected*. Geneva: WHO, 2020.
- Wasistiono & F Simangunsong, 2009, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Modul 1, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- Weaver, David, 2006, *Sustainable Tourism*, Oxford: Butter-worh-Heinemann

Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. *N Engl J Med.* 2020; 382:727-33.

b. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dan Adaptasi Kebiasaan Baru

c. sumber lainnya

AyoTasik.com, Pangandaran Belum Ubah Kebijakan Terkait Wisata Pantai, pada URL <https://www.ayotasik.com/read/2020/09/11/6315/pangandaran-belumubah-kebijakan-terkait-wisata-pantai>

kemenparekraf.go.id, Kunci Pengembangan Pariwisata Ada di Pemerintah Daerah, 8 Desember 2011 <https://www.kemenparekraf.go.id/post/kunci-pengembanganpariwisata-ada-di-pemerintah-daerah>

kemkes.go.id, 2020, Tentang Novel Coronavirus (NCOV), diakses pada <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>

suaramerdeka.news, Pariwisata, Sektor Pertama dan Paling Terdampak Pandemi COVID-19, 4/05/2020, <https://suaramerdeka.news/pariwisata-sektor-pertamadan-paling-terdampak-pandemi-covid-19/>

LAMPIRAN OPERASIONAL VARIABEL

No	Variabel	Dimensi	Subdimensi
1.	Dynamic Governance	<i>Culture</i>	Budaya Organisasi Pemerintah
		Capabilities	Thinking ahead
			thinking again
			thinking across
Change	Adaptive policy		
2.	Dukungan Stakeholder dalam Penanganan Covid	Penerapan Protocol Kesehatan	Penerapan Protocol Kesehatan oleh pelaku usaha
			Penerapan Protocol Kesehatan oleh pengunjung
			Penerapan Protocol Kesehatan oleh pengunjung

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber:

Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran

1. Bagaimana kebijakan penanganan covid-19 di lingkungan Kantor Pemerintah Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana menurut Bapak kebijakan penerapan protocol kesehatan di lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana pemerintah Kabupaten Pangandaran mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan covid yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan pengembangan pariwisata?
4. Apakah pemerintah kabupaten Pangandaran telah menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman covid dan mengeksplorasi peluang baru terhadap sektor pariwisata?
5. Apakah pemerintah kabupaten Pangandaran mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai dalam penanganan covid?
6. Bagaimana pemerintah Kabupaten Pangandaran menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan lebih baik dan menikmati hasil pelayanan?
7. Bagaimana pemerintah Kabupaten Pangandaran menyesuaikan kebijakan dan program dari pusat agar sesuai dengan persyaratan kebijakan local dan kebutuhan warga Pangandaran?
8. Apakah ada kendala terkait penanganan penyebaran pandemic covid di Kabupaten Pangandaran?

Kasatpol PP Kabupaten Pangandaran

1. Apakah ada dasar kebijakan yang didasari oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pemantauan protocol kesehatan?
2. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja memandang antara penegakan kebijakan protocol kesehatan di kabupaten Pangandaran
3. Tindakan bagaimana yang ayng diberikan kepada pelanggar protocol kesehatan dari anggota masyarakat?
4. Tindakan bagaimana yang ayng diberikan kepada pelanggar protocol kesehatan dari pelaku usaha?
5. Tindakan bagaimana yang ayng diberikan kepada pelanggar protocol kesehatan dari Pegawai Pemkab?
6. Adakah perlindungan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan kebijakan protocol kesehatan?
7. Apakah ada kendala terkait penanganan penyebaran pandemic covid di Kabupaten Pangandaran?

Petugas Satgas Penanganan Covid

1. Bagaimana pandangan Bapak/ibu mengenai kebijakan Pemkab Pangandaran yang tetap membuka sektor wisata di Pangandaran?
2. Adakah sosialisasi protocol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?
3. Bagaimana intensitas sosialisasi protocol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?
4. Apa bentuk sosialisasi protocol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?
5. Bagaimana protocol kesehatan terkait pengunjung baru di Kabupaten Pangandaran?
6. Apakah ada kendala terkait penanganan penyebaran pandemic covid di Kabuapten Pangandaran?

Pelaku usaha di Kabupaten Pangandaran

1. Bagaimana dampak dari pandemic covid bagi usaha Bapak/ibu?
2. Adakah sosialisasi dari pemerintah terkait protocol kesehatan di lingkungan usaha bapak/ibu?
3. Bagaimana pandangan Bapak/ibu bila ada wisatawan yang tidak menerapkan protocol kesehatan?
4. Apakah tempat usaha Bapak/ibu telah menerapkan protokol kesehatan?
5. Bagaimana sikap Bapak/ibu bila di lingkungan sekitar usaha terdapat pasien yang terkena covid-19?

Masyarakat Pangandaran

1. Bagaimana pandangan Bapak/ibu mengenai kebijakan Pemkab Pangandaran yang tetap membuka sektor wisata di Pangandaran?
2. Adakah sosialisasi protocol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?
3. Apa bentuk sosialisasi protocol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah?
4. Adakah rasa kekhawatiran Bapak/ibu mengenai kebijakan tersebut akan berdampak penyebaran covid?
5. Bagaimana sikap Bapak/ibu bila ada pengunjung/pendatang yang tidak menerapkan protocol kesehatan?
6. Bagaimana sikap Bapak/ibu bila ada disekitar lingkungan Bapak Ibu ada yang terkena Covid-10?

Para Pengunjung di Lokasi Wisata Pangandaran

1. Bagaimana pandangan Bapak/ibu terkait dibukanya sektor wisata di Kawasan wisata Pangandaran?
2. Bagaimana protocol kesehatan ketika Bapak/ibu masuk ke Kawasan wisata Pangandaran?
3. Apakah ada kendala ketika memasuki Kawasan Wisata Pangandaran?
4. Adakah sosialisasi protocol kesehatan yang diberikan petugas kepada pengunjung tempat wisata?
5. Baimana bentuk sosialisasi protocol kesehatan yang diberikan petugas kepada pengunjung tempat wisata?

DAFTAR KUESTIONER PERNYATAAN RESPONDEN

NAMA :

UMUR :

PEKERJAAN :

No.	Pernyataan	Jawaban			
		SS	S	KS	TS
THI NKING AHEAD					
1.	mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan				
2.	memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program yang ada				
3.	menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksploitasi peluang baru				
4.	mempengaruhi pengambil keputusan utama dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang akan dilakukan				
THI NKING AGAIN					
1.	meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik				
2.	menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku, baik untuk				

	memenuhi atau mengetahui target yang hilang				
3.	meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program untuk diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak,				
4.	mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai				
5.	menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan lebih baik dan menikmati hasil yang berarti				
THINK ACROSS					
1.	mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa				
2.	merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman				
3.	mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik, dan apa akan diterima oleh penduduk setempat				
4.	menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inovatif untuk masalah yang muncul, dan e) menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan local dan kebutuhan warga negara				